

# **IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DI PASAR TRADISIONAL MANGLI JEMBER PASCA REVITALISASI**

## **SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
pada program studi Ekonomi Syariah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh :

**FAJRIYAH RAMADHANI**

**NIM: 212105020068**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISALAM  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
2025**

# **IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DI PASAR TRADISIONAL MANGLI JEMBER PASCA REVITALISASI**

## **SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
pada program studi Ekonomi Syariah.

Oleh :

**FAJRIYAH RAMADHANI**  
**NIM : 212105020068**

Disetujui Pembimbing

  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI Haji Achmad Siddiq**  
**(Nur Alifah Fajariah S. E., M. SA)**  
**NIP. 198012222023212009**

# IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DI PASAR TRADISIONAL MANGLI JEMBER PASCA REVITALISASI

## SKRIPSI

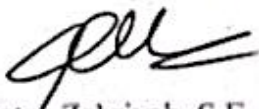
telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
pada program studi Ekonomi Syariah.

Hari: Rabu  
Tanggal: 10 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



(Aminatus Zahriyah, S.E., M.Si)  
NIP: 198907232019032012



(Dr. Nurhidayat, SE., MM)  
NIP: 197905052023211015

Anggota:

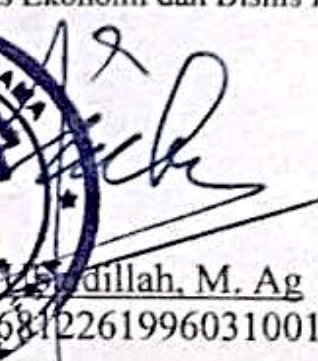
1. Dr. Nurul Setianingrum, SE., MM
2. Nur Alifah Fajariyah, SE., MSA



Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
(Abdillah, M. Ag)  
NIP: 196812261996031001

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." Qur'an Surah An-Nisa' (4): Ayat 58.



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin* dengan kesungguhan hati penulis mengucapkan rasa syukur yang tiada hentinya kepada sang pencipta Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sungguh luar biasa bagi penulis sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita para umat dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan iman sampai saat ini.

Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan bimbingan dorongan serta doa yang tiada hentinya dari berbagai pihak Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada yaitu:

1. Kepada cinta pertama dan terakhirku, ayah yang hebat dan kuat, terimakasih atas semua dukungan yang engkau berikan dari kecil hingga dewasa. Skripsi ini aku persembahkan untukmu. Aku sudah menepati janjiku untuk menyandang gelar sarjana seperti yang engga inginkan. bahagia disana ayah semoga tuhan selalu menempatkan engkau di tempat paling indah, amiin.
2. Kepada Bidadari surgaku. Terimakasih ibu atas semua doa-doa dan dukunganmu sampai saat ini. Semoga gelarku ini bisa menambah rasa banggamu kepadaku.
3. Kepada Kedua kakak laki-lakiku. Terimakasih banyak sudah menjadi sosok panutan yang baik, terimakasih atas semua dukungannya selama ini.
4. Untuk diriku sendiri, hai riara akhirnya kamu sudah bisa menulis pada

lampiran persembahan ini. So proud of you, terimakasih sudah selalu kuat dan semangat dari awal langkahmu. Akhirnya kamu sampai pada gerbang akhir perang ini, sekali lagi semangat.

5. Untuk teman-teman tersayanku, hai evi eh jin terimakasih ya sudah selalu support aku, selalu mau mendengar keluh kesahku aku gak akan pernah menyesal dipertemukan denganmu. Hai dina dan intan, terimakasih sudah selalu baik padaku, terimakasih atas dukungan kalian selama proses penulisan skripsi ini.
6. Kepada seluruh Dosen-Dosen UIN KHAS Jember penulis ucapkan terimakasih telah memberikan bimbingan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
7. Kepada author au kesayanganku. kak mai, kak moody, kak miny, kak joha, cupaw, rara tutu, kak ra, kak celly, ipii, bryyn, kak ren, kak biw, dan noah. Terimakasih sudah menulis cerita yang sangat indah dan menghibur, tulisan-tulisan kalian menjadi penyemangatku dalam proses penyelesaian skripsi ini. Sekali lagi terimakasih tolong jangan berhenti untuk terus menulis.
8. Kepada teman kelas Ekonomi Syariah 4 yang telah berjuang bersama dalam menyelesaikan tugas akhir di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
9. Kepada seluruh keluarga, sahabat, teman dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih telah menjadi pendukung dan penghibur selama penulis menyusun skripsi ini semoga ini menjadi motivasi untuk semuanya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, penegerjaan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sebagai prasyarat untuk menyelesaikan program sarjana, dapat terlaksana dengan. Dan tidak lupa pula shalawat beserta salam selalu penulis haturkan kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah banyak memeberikan ajaran kebaikan kepada seluruh umat muslim.

Keberhasilan ini bisa diperoleh penulis tentu karena kerja sama serta *support* banyak pihak. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Hepni, S.Ag., M.M.,CPEM. Selaku Rektor UIN KHAS Jember yang memberikan fasilitas yang memadai selama kami menuntut ilmu di UIN KHAS jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah., M.Ag Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN KHAS jember.
3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah., S.H.I., Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam UIN KHAS jember.
4. Dr. Nurul Setianingrum, SE., MM., selaku Dosen Pembibing Akademik.
5. Ibu Nur Alifah Fajariah S. E., M. SA Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan pengarahen serta memeberikan motivasi dalam penulisan skripsi.
6. Bapak/Ibu Dosen Dan Staff Akademik Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang telah memeberikan bimbingan, serta sarana prasarana dalam penelitian ini.
7. Seluruh Dosen UIN KHAS jember yang telah ikhlas mengamalkan ilmu selama proses perkuliahan.
8. Serta semua pihak yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam bentuk doa, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, mahasiswa, dan masyarakat secara umum. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa dan teori yang disajikan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar penelitian selanjutnya dapat menjadi lebih baik.

Jember, 27 November 2025

Penulis





## ABSTRAK

*Good governance* merupakan tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha atau berkarya. *Good governance* seringkali diartikan sebagai pemerintahan yang baik. *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran, salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Fokus penelitian yang dipaparkan dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana implementasi *good governance* di pasar tradisional mangli jember? 2) Apa saja tantangan dalam implementasi *good governance* di pasar tradisional mangli jember?

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan: 1) Untuk mengetahui implementasi *good governance* di pasar tradisional mangli jember. 2) Untuk mengetahui apakah apa saja tantangan dalam implementasi *good governance* di pasar tradisional mangli jember.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *field research*. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini adalah untuk melakukan penelitian langsung di lapangan untuk mengamati dan menggali informasi dari sumber terkait. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive*, merupakan pengambilan sumber data yang dilandasi tujuan atau pertimbangan terlebih dahulu. Pola pengumpulan data yang digunakan seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah Analisis Deskriptif, dan menarik kesimpulan menggunakan trigulasi sumber.

Sehingga peneliti mendapat kesimpulan 1) Penerapan *good governance* pada pengelolaan pasar mangli sudah diterapkan dengan baik. Implementasi *good governance* pasca revitalisasi menunjukkan kemajuan dalam akuntabilitas fiskal dan operasional, peningkatan transparansi informasi anggaran dan layanan, serta peningkatan partisipasi pemangku kepentingan. Namun, masih diperlukan mekanisme umpan balik yang lebih terstruktur, peningkatan kapasitas pengelola, dan evaluasi berkala untuk menjaga relevansi kebijakan seiring dinamika pasar. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya, infrastruktur pendukung yang belum optimal, serta kebutuhan peningkatan kapasitas pengelola pasar. Faktor pendukung meliputi komitmen pengelola, dukungan kebijakan lokal, dan partisipasi aktif pedagang serta pengunjung. 2) Tantangan utama yang dihadapi pengelola pasca-revitalisasi meliputi. Sulit memberikan pemahaman kepada pedagang karena istilahnya asing dan abstrak, diperlukan sosialisasi yang fokus pada manfaat praktis. Sulit menjaga fasilitas tetap terawat. Pasar masih kurang dalam penerapan revitalisasi manajemen dan perilaku (seperti kebersihan lapak dan pelatihan layanan pelanggan) yang dibutuhkan untuk bersaing dengan pasar modern.

**Kata Kunci:** *good governance*, pasar tradisional, dan revitalisasi.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Kajian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Subyek Penelitian.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Analisa Data.....	39
F. Keabsahan Data.....	40
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	42
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	44
B. Penyajian Data dan Analisis.....	46
C. Pembahasan Temuan.....	70
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pasar Jember .....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	25



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Pasar Mangli sebelum dan sesudah revitalisasi .....	46
--	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pasar adalah salah satu dari beberapa sistem, prosedur, koneksi sosial, dan infrastruktur yang memungkinkan bisnis menjual barang dan jasa dan menyediakan kesempatan kerja bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Produk dan layanan dijual menggunakan metode pembayaran yang aman, seperti uang tunai. Kegiatan ini merupakan aspek ekonomi. Masyarakat dapat menggunakan pasar sebagai tempat mencari uang sebagai sumber informasi. Pasar dibagi menjadi dua kategori: tradisional dan modern.

Di era modern ini, masyarakat semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pasar, yang sangat penting untuk memahami bagaimana prinsip *Good Governance* memengaruhi revitalisasi ekonomi. Sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan revitalisasi dapat dicapai secara komprehensif dengan menerapkan prinsip *Good Governance* di pasar tradisional seperti Pasar Mangli. *Good Governance* dapat didefinisikan sebagai layanan publik yang efisien, sistem tata kelola yang dapat dikritik, dan pemerintahan yang bertanggung jawab kepada publik. *Good Governance* mengacu pada pemerintahan yang stabil, baik hati, dan efektif yang menjaga interaksi yang konstruktif antara negara, sektor swasta, dan masyarakat di antara domain lainnya (*state, private sector and society*).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Elvira Zeyn, pengaruh penerapan good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan, fakultas ekonomi universitas pasundan bandung, vol 10 No 1, 2011.

Dalam teorinya, *good governance* menekankan pentingnya partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan termasuk pedagang, pembeli, masyarakat sekitar, dan pemerintah. Revitalisasi yang sukses memerlukan dialog dan kolaborasi untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi semua pihak terpenuhi. *Good governance*, yang mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan tegaknya supremasi hukum, merupakan kunci keberhasilan dalam pengelolaan pasar yang baik. Pasca revitalisasi, sangat penting untuk mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip *good governance* diterapkan dalam pengelolaan Pasar.

Program revitalisasi pasar tradisional telah dirintis Kementerian Perdagangan sejak tahun 2004 hingga sekarang. Program tersebut sedikit banyak memberi perlindungan kepada pasar tradisional sehingga dapat berdiri sejajar dengan pasar modern yang perkembangannya seperti tak tertahankan. Pasar tradisional identik sebagai pasar dengan kondisi fisik yang jorok, manajemen kurang teratur, pengemasan (*packing*) apa adanya. Persepsi yang membuat pasar tradisional dimata masyarakat agak sedikit minor, underestimate, dan tak profesional, bersih, rapi, ramah, self service, dan produk yang terstandarisasi akan melekat. Sehingga Tujuan revitalisasi adalah untuk mengembangkan pasar tradisional dan komunitas lokal ke dalam kondisi yang lebih baik.<sup>2</sup>

Pemerintah Kabupaten Jember memiliki program membangun dan mengembangkan pasar tradisional dalam hal penataan pedagang yang mana

---

<sup>2</sup>Yuni Syafa'atul Barokah, Dampak Revitalisasi pasar tradisional dalam meningkatkan pendapatan pedagang pasar tanjung kabupaten jember, fakultas ekonomi dan bisnis islam, Mei 2020.

dulunya hanya terdapat satu lantai saja sekarang menjadi dua lantai. Pasar Mangli dulunya terkesan kotor, kumuh dan tidak tertata maka dengan adanya program pengembangan pasar tradisional, pasar Mangli menjadi lebih bersih dan lebih tertata. Pedagang dulunya yang tidak memiliki tempat, sekarang sudah dipindah dan disediakan tempat yang lebih layak lagi sehingga pembeli merasa lebih nyaman ketika berbelanja di pasar Mangli. Tujuannya untuk memperbaiki pasar tradisional. Pengembangan pasar Mangli diutamakan untuk menata pedagang dengan memberikan fasilitas yang lebih baik. Pada tahun 2023, pemerintah daerah telah melaksanakan program revitalisasi untuk meningkatkan fasilitas dan tata kelola pasar, dengan harapan meningkatkan kondisi fisik pasar serta tata kelola dan pelayanan. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan infrastruktur pasar agar lebih efektif dan efisien.<sup>3</sup> Dan merupakan bagian dari 22 inisiatif yang diluncurkan oleh Bupati Jember untuk memperbaiki kondisi pasar tradisional di wilayah tersebut. Revitalisasi Pasar Mangli mencakup berbagai aspek, mulai dari perbaikan fisik bangunan hingga penataan ulang lokasi berdagang.

Revitalisasi pasar seperti yang dilakukan di pasar mangli ini erat hubungannya dengan *good governance* karena konsep *good governance* adalah tata kelola yang baik yang berupaya memenuhi harapanharapan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan. Pernyataan tersebut sejalan dengan upaya pembangunan, khususnya pembangunan daerah yang berdasarkan dari manajemen tata kelola pemerintahan daerah setempat yang

---

<sup>3</sup> Ava Ayun Avinas dan Ria Angin M. si, Implementasi Program Pengembangan Pasar Tradisional Menjadi Lebih Baik Di Kabupaten Jember, fakultas ilmu social dan ilmu politik, Universitas Negeri Muhammadiyah Jember.



baik dan bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup>

Pasar Mangli salah satu yang masuk dalam alokasi program pengembangan pasar tradisional, karena melihat produktifitas pasar Mangli yang sangat tinggi dibandingkan dengan pasar yang lain seperti, pasar Kepatihan, pasar Gebang yang berada di Kecamatan Kaliwates dan lokasi Pasar Mangli juga berada disebalah jalan protokol. Oleh karena itu pasar Mangli tepat untuk dikembangkan. Pemerintah memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Mangli, tanpa mengesampingkan pasar tradisional lain yang sama berada di Kecamatan Kaliwates.<sup>5</sup>

Tabel 1.1

Data Pasar Jember

No	Nama Pasar	Luas	Toko	Kios	los
1	Pasar Mangli	2473 m <sup>2</sup>	20 unit	7 unit	114 unit
2	Pasar Tegal Besar	4825 m <sup>2</sup>	49 unit	14 unit	21 unit
3	Pasar Kreongan	1981,3 m <sup>2</sup>	48 unit	-	4 unit
4	Pasar Tanjung	25.105 m <sup>2</sup>	417 unit	520 unit	314 unit
5	Pasar wirolegii	3072 m <sup>2</sup>	10 unit	32 unit	40 unit

Pada tabel data diatas menunjukkan bahwa pasar mangli memiliki skala yang lebih besar dalam konteks perdagangan tradisional lokal. Pasar Mangli

<sup>4</sup> Mimin Sundari Nasution, Good Governance Dalam Relokasi Pasar Selodang Kelapa Di Kabupaten Indragiri Hilir, Public Service And Governance Journal, vol 4 No 02, juli 2023.

<sup>5</sup> Ava Ayun Avinas dan Ria Angin M. si, Implementasi Program Pengembangan Pasar Tradisional Menjadi Lebih Baik Di Kabupaten Jember, fakultas ilmu social dan ilmu politik, Universitas Negeri Muhammadiyah Jember.

termasuk kedalam pasar-pasar utama seperti Pasar Tanjung, Pasar Kreongan, dan Pasar Tegalbesar, karena mereka sering menjadi lokasi operasi pasar murah atau program stabilisasi harga Pemkab Jember. Pasar Mangli memiliki tingkat kepadatan unit yang sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa penggunaan lahan di Pasar Mangli sangat dioptimalkan untuk menampung banyak pedagang kecil terutama di area los. Perputaran ekonomi di pasar mangli juga sangat baik karna transaksi aktif yang terjadi setiap harinya.<sup>6</sup>

Aspek terpenting dalam program revitalisasi adalah sosial, ekonomi, dan fisik, sehingga proses inovasi pasar memerlukan pembentukan unit pasar, perluasan ruang pasar, dan perbaikan struktur pasar. Beberapa indikator seperti pendapatan, kondisi fisik, dan tata kelola dapat digunakan untuk mendorong revitalisasi. Dengan adanya program ini, pengelolaan pasar menjadi lebih profesional, dan lokasi pedagang menjadi lebih ramai. Revitalisasi pasar tidak hanya berkaitan dengan fisik bangunan, tetapi juga melibatkan aspek manajerial dan kebijakan yang mendukung pengelolaan yang lebih baik. Program pengembangan pasar tradisional di Pasar Mangli ini didukung sepenuhnya oleh pemerintah Kabupaten Jember. Pemerintah telah membentuk tim yang bertugas untuk melaksanakan proyek ini, dimana tiap-tiap elemennya memiliki pengetahuan yang cukup tentang kebijakan yang digunakan. Komitmen yang kuat dari pihak pelaksana lapangan, seperti kontraktor, juga memastikan bahwa tugas-tugas yang diberikan sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

---

<sup>6</sup> Siskaperbapo. jatimprov.go.id.

Sebagian besar penelitian mengenai *good governance* lebih banyak berfokus pada sektor pemerintahan atau pasar modern, dengan penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengelolaan pasar. Namun, sedikit sekali kajian yang mengkaji implementasi prinsip *good governance* pada pasar tradisional, khususnya di daerah yang telah mengalami revitalisasi. Pasar tradisional beberapa ditemukan menjadi objek penelitian ekonomi dan sosial, tetapi kajian terkait penerapan *good governance* dalam konteks pasca revitalisasi masih terbatas. Oleh karena itu penelitian ini mengisi kesenjangan dalam literatur dan memberikan data empiris yang lebih komprehensif. Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul penelitian “Analisis Implementasi *Good Governance* Di Pasar Tradisional Pasca Revitalisasi”.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana implementasi *good governance* di pasar tradisional mangli jember sebelum dan sesudah revitalisasi ?
2. Apa saja tantangan dalam implementasi *good governance* di pasar tradisional mangli jember?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi *good governance* di pasar tradisional mangli jember pasca revitalisasi.
2. Untuk mengetahui apa saja tantangan dalam implementasi *good governance* di pasar tradisional mangli jember.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan teori, khususnya dalam bidang administrasi publik, manajemen, dan pembangunan daerah.

### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk:

- a. **Pemberdayaan Masyarakat:** Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya para pedagang dan pengunjung pasar, dalam partisipasi aktif dalam pengelolaan pasar.
- b. **Perbaikan Tata Kelola Pemerintah:** Temuan penelitian dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, khususnya dalam bidang perdagangan.

Penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan baik pada pengembangan teori maupun pada praktik pembangunan lokal.

## **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah merupakan penjelasan dari kata per kata atau frasa penting yang tercantum dalam judul penelitian. Tujuan dari hal ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahpahaman dalam interpretasi makna istilah yang dapat menyebabkan penyimpangan oleh pembaca dalam skripsi ini.

# 1. *Good governance*

*Good governance* merupakan tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha atau berkarya. *Good governance* seringkali diartikan sebagai pemerintahan yang baik. *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran, salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Sedangkan menurut UNDP, *good governance* adalah penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat.

*Good governance* adalah sebuah sistem yang dalam menjalankan pemerintahan berdasar dari pola hubungan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha atau swasta dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintah dengan didukung oleh prinsip-prinsip dasar seperti kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, keadilan, profesionalisme, dan demokratis seperti tuntutan pemerintahan yang bersih atau biasa disebut *clean government* yang diprakarsai oleh UNDP, *World Bank*, *United Nation*, dan beberapa lembaga internasional lainnya.

## 2. *Governance/* Tata Kelola

Tata kelola pasar adalah serangkaian proses, praktik, dan prinsip yang digunakan untuk mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan pasar. Ini mencakup berbagai aspek seperti pengelolaan pasar, penataan pedagang, standar kualitas layanan, serta pemanfaatan fasilitas pasar. Tata kelola pasar yang baik bertujuan untuk menciptakan pasar yang tertib, efisien, dan berkelanjutan, serta memberikan kepuasan bagi pedagang dan pembeli.

## 3. Pasar tradisional

Pasar dalam pengertian ekonomi adalah situasi seseorang atau lebih pembeli (konsumen) dan penjual (produsen dan pedagang) melakukan transaksi setelah kedua pihak telah mengambil kata sepakat tentang harga terhadap sejumlah (kuantitas) barang dengan kualitas tertentu yang menjadi objek transaksi. Kedua pihak, pembeli dan penjual mendapat manfaat dari adanya transaksi atau pasar. Pihak pembeli mendapat barang yang diinginkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya sedangkan penjual mendapat imbalan pendapatan untuk selanjutnya digunakan untuk membiayai aktivitasnya sebagai pelaku ekonomi produksi atau pedagang.

Pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara langsung. Pasar tradisional biasanya menjual barang kebutuhan sehari-hari. Merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual

pembeli secara langsung, bangunannya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka penjual maupun suatu pengelola pasar, sebagian besar menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, barang elektronik, jasa, dll. Selain itu juga menjual kue tradisional dan makanan nusantara lainnya.

#### 4. Revitalisasi

Revitalisasi adalah proses menghidupkan kembali sesuatu yang sebelumnya kurang terberdaya. Revitalisasi adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya sehingga revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan untuk menjadi vital, sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau sangat diperlukan sekali untuk kehidupan dan sebagainya.

Revitalisasi pasar adalah upaya untuk memperbaiki pasar tradisional, baik dari segi fisik, manajemen, maupun tata kelola. Tujuannya agar pasar tradisional dapat bersaing dengan pasar modern dan pusat perbelanjaan. Revitalisasi pasar rakyat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan nilai atau menghidupkan kembali pasar rakyat melalui intervensi fisik dan non-fisik (sosial dan budaya) yang dapat meningkatkan fungsi sebelumnya.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan suatu gambaran umum isi atau materi dari skripsi ini. Maka peneliti akan menyajikan sebuah sistematika pembahasan didalamnya terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu diantaranya:

1. Bagian pertama, didalamnya terdiri dari lampiran judul, lampiran persetujuan, lampiran pengesahan, lampiran motto, lampiran persembahan, kata pengantar, dan daftar isi.
2. Bagian kedua adalah isi, yang tersusun dalam beberapa bab, diantaranya:

**BAB I PENDAHULUAN**, yang berisi tentang latar belakang masalah, focus penelitian, tujuan, manfaat penelitian, dan definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

**BAB II KAJIAN KEPUTAKAAN**, yang meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori.

**BAB III METODE PENELITIAN**, yang akan menjelaskan metode penelitian sebagai acuan dalam penelitian ini, yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahapan penelitian.

**BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**, pada bab ini membahas tentang penyajian data dan analisis yang menjelaskan gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan tentang penerapan *good governance* di pasar tradisional mangli setelah revitalisasi.

**BAB V PENUTUP**, yang merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Menyediakan ringkasan atas



penjelasan yang berisi keseluruhan yang ditemukan dalam penelitian dan dengan fokus penelitian. Kesimpulan diperoleh atas dasar analisis serta pemahaman yang didapat dari data yang dihasilkan dan telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya,

Bagian akhir dari skripsi ini akan dicantumkan Daftar Pustaka.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti mencantumkan hasil dari penelitian terdahulu yang kemudian akan dikaitkan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti.

1. Ipan Nurhidayat, “prinsip-prinsip *good governance* di indonesia”. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Tasikmalaya, Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti berusaha untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan membangun makna tentang prinsip-prinsip *good governance* di Indonesia. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara dengan informan yang relevan untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai prinsip-prinsip *good governance* di Indonesia, serta melakukan studi dokumentasi untuk mendukung data yang diperoleh dari wawancara tersebut.

Kesimpulan dari jurnal penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia, masih terdapat kebocoran dalam implementasinya akibat kurangnya transparansi. Hal ini mengindikasikan bahwa pengimplementasian prinsip-prinsip *good governance* belum

sepenuhnya berhasil dan memerlukan perhatian lebih untuk mencapai hasil yang optimal.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada metode penelitian yang menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan datanya menggunakan cara wawancara serta topik yang sama yaitu membahas *good governance*. Perbedaannya adalah di penelitian ini hanya fokus kepada prinsip-prinsip *good governance* Indonesia, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memfokuskan topik tersebut dengan revitalisasi.<sup>7</sup>

2. Sjahruddin Rasul, “Penerapan *Good Governance* Di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”.

Metode penelitian yang digunakan dalam konteks pengukuran kinerja dan evaluasi hasil pengukuran dapat mencakup pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang umum digunakan antara lain: Survei menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data dari responden mengenai persepsi mereka terhadap kinerja aparat penegak hukum. Wawancara, melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang lebih detail dan kontekstual. Analisis Dokumen, mengkaji dokumen-dokumen resmi dan laporan untuk mendapatkan data yang relevan mengenai kinerja dan efektivitas program. Pengukuran kinerja juga melibatkan pengukuran

---

<sup>7</sup>Ipan Nurhidayat, “prinsip-prinsip *good governance* di indonesia”. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Tasikmalaya, Indonesia.

masukan, keluaran, hasil, efisiensi, dan efektivitas untuk menilai pencapaian tujuan.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengukuran kinerja aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan efektivitas, persepsi negatif dari masyarakat terhadap peran aparat penegak hukum menunjukkan adanya ketidakpuasan yang signifikan. Hal ini mencerminkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap kebijakan dan praktik yang ada, serta penetapan hasil yang diinginkan yang lebih jelas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, penting untuk memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, seperti integritas dan profesionalisme aparat, serta kondisi lingkungan yang dapat memicu praktik korupsi. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya juga menjadi kunci untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang diteliti adalah teknik pengambilan data sama-sama menggunakan wawancara, sama-sama membahas tentang penerapan *good governance*. Perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus pada penerapan *good governance* di bidang hukum, sedangkan penelitian yang sedang diteliti

berfokus pada penerapan *good governance* dalam aspek ekonomi dengan lingkup penelitian di pasar tradisional.<sup>8</sup>

3. A Teras Narang, “kajian implementasi *good and clean governance* di provinsi Kalimantan tengah”. Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis dengan pendekatan deskriptif-naratif. Penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif, yang bertujuan untuk memahami gejala yang diteliti.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah telah cukup berhasil dalam mengimplementasikan konsep *good governance* dan *clean governance*. Hal ini tercermin dari berbagai capaian di bidang peningkatan kapasitas pemerintah daerah, serta upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang diteliti adalah merupakan penelitian kualitatif dan topic pembahasan yang sama yaitu *good governance*. Perbedaannya adalah perbedaan subjek dari topik pembahasannya, penelitian yang sedang diteliti memfokuskan topik *good governance* dalam cakupan revitalisasi.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Sjahrudin Rasul, “Penerapan Good Governance Di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”, komisi pemberantasan korupsi republic Indonesia,

<sup>9</sup> A Teras Narang, “kajian implementasi *good and clean governance* di provinsi Kalimantan tengah”. Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular.

4. Erfan Hidayat, Teguh Pramono, Imam Fachruddin, Fendy Artha Prissando<sup>4</sup>, “penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam mewujudkan kualitas pelayanan public pada dinas perdagangan kabupaten Kediri. Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kediri.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, metode *snowball sampling* diterapkan untuk mendapatkan data dari *stakeholder* seperti pedagang pasar.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa catatan, terutama dalam hal transparansi dan partisipasi. Transparansi perlu diperkuat melalui komitmen antar pemangku kepentingan, sementara partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan masih belum optimal. Dukungan dari pimpinan dan kolaborasi antar pihak juga menjadi faktor pendukung yang penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perdagangan.

Persamaannya adalah teknik pengambilan data yang menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, topik yang digunakan juga sama yaitu penerapan prinsip *good governance*. Perbedaannya adalah penelitian tersebut fokus pembahasannya penerapan *good governance* dalam pelayan

public dinas perdagangan, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas penerapan pada pasar setelah revitalisasi.<sup>10</sup>

5. Hikmatyas, mimin sundari nasution, “*good governance* dalam relokasi pasar selodang kelapa di kabupaten indragili hilir”. Universitas riau.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan secara kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan pengumpulan dokumentasi. Analisis data bersifat induktif/kualitatif, dengan penekanan pada makna daripada ringkasan.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam relokasi Pasar Selodang Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir belum sepenuhnya optimal. Meskipun pemerintah telah berupaya melibatkan pedagang dalam proses relokasi, partisipasi mereka masih terbatas, yang menyebabkan penolakan dari sebagian pedagang. Selain itu, aspek transparansi dan akuntabilitas juga perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa proses relokasi berjalan sesuai dengan harapan masyarakat dan peraturan yang ada.

Persamaannya terletak pada metode dan teknik pengumpulan datanya, juga topik pembahasan yang diteliti sama yaitu *good governance*

---

<sup>10</sup> Erfan Hidayat, Teguh Pramono, Imam Fachruddin, Fendy Artha Prissando4, “penerapan prinsip-prinsip good governance dalam mewujudkan kualitas pelayanan public pada dinas perdagangan kabupaten Kediri, Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kediri.

dalam lingkup pasar. Perbedaannya penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan dan fenomena yang diambil adalah revitalisasi.<sup>11</sup>

6. Putu deny adistanaya, “implementasi peraturan walikota nomor 9 tahun 2009 dalam revitalisasi pasar tradisional di kota Denpasar”. Fakultas hokum universitas warmadewa Denpasar bali indoesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang bertujuan untuk melihat hukum dalam praktik dan mempelajari cara kerja hukum dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologis, dengan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan sumber data sekunder berasal dari bahan kepustakaan. Teknik pengambilan data meliputi wawancara dan studi kepustakaan.

Kesimpulan dari artikel mengenai revitalisasi pasar tradisional di Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Pentingnya Revitalisasi: Revitalisasi pasar tradisional sangat penting untuk perkembangan ekonomi masyarakat, terutama dalam menghadapi persaingan dengan pasar modern dan online.
2. Kendala yang Dihadapi: Proses revitalisasi menghadapi berbagai kendala, termasuk anggaran yang terbatas, relokasi pedagang, dan tantangan infrastruktur.
3. Faktor yang Mempengaruhi: Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan respons publik memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan revitalisasi.
4. Koordinasi yang

---

<sup>11</sup> Hikmatyas, mimin sundari nasution, “good governance dalam relokasi pasar selodang kelapa di kabupaten indragili hilir”. Universitas riau.



Diperlukan: Diperlukan peningkatan koordinasi antara pemerintah dan pedagang untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional. 5. Rekomendasi: Untuk mencapai revitalisasi yang efektif, diperlukan manajemen yang baik dan penyesuaian kebijakan strategis agar pasar tradisional dapat beradaptasi dan bersaing dengan pasar modern. Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa kemajuan, tantangan yang ada masih perlu diatasi untuk mencapai tujuan revitalisasi yang diinginkan.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan adalah teknik pengambilan datanya menggunakan wawancara dan meneliti tentang revitalisasi pasar tradisional. Perbedaannya adalah penelitian tersebut menggunakan pendekatan hukum empiris, sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>12</sup>

7. Abd. Rohman, “revitalisasi pasar rakyat sebagai upaya menjaga eksistensi pasar tradisional”. Program studi administrasi publik universitas tribhuwana tunggadewi Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui triangulasi. Teknik pengambilan data meliputi wawancara, observasi di lapangan, dan dokumentasi. Peneliti mengkolaborasikan hasil dari ketiga teknik ini untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa revitalisasi pasar rakyat di Kota Malang dilakukan secara komprehensif, tidak hanya

---

<sup>12</sup> Putu deny adistanaya, “implementasi peraturan walikota nomor 9 tahun 2009 dalam revitalisasi pasar tradisional di kota Denpasar”. Fakultas hokum universitas warmadewa Denpasar bali indoesia.

melalui pembangunan fisik tetapi juga dengan memperbaiki manajemen dan pengelolaan pasar. Program-program inovatif seperti Sekolah Pasar Rakyat Pedagang Cerdas (Sepasar Pedas) dan penerapan e-retribusi telah meningkatkan citra pasar rakyat, menjadikannya lebih aman, nyaman, dan mampu bersaing dengan pasar modern. Selain itu, partisipasi ASN dalam gerakan Sobo Pasar juga berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal dan nilai-nilai budaya masyarakat.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian yang sama yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, serta topik pembahasan sama tentang revitalisasi pasar tradisional. Perbedaannya adalah penelitian tersebut fokus membahas revitalisasi saja, sedangkan penelitian yang diteliti membahas revitalisasi dalam aspek *good governance*.<sup>13</sup>

8. Abd. Rahman, "Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik". Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, teknik penentuan sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu.

---

<sup>13</sup> Abd. Rohman, "revitalisasi pasar rakyat sebagai upaya menjaga eksistensi pasar tradisional". Program studi administrasi publik universitas tribhuwana tunggadewi Indonesia.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Lowokwaru sudah dijalankan dengan baik. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang persyaratan pelayanan, ketidakhadiran petugas, serta masalah teknis seperti pemadaman listrik dan jaringan yang tidak stabil. Untuk mengatasi hal ini, disarankan agar dilakukan sosialisasi lebih intensif mengenai persyaratan pelayanan kepada masyarakat.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang sama yaitu metode kualitatif dengan teknik triangulasi, juga topik pembahasan yang sama yaitu *good governance*. Perbedaannya adalah penelitian tersebut fokus membahas penerapan *good governance* di bidang pelayanan publik, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan membahas penerapan *good governance* di pasar tradisional.<sup>14</sup>

9. Arbainah, “*Good Governance* dalam pembangunan pasar agrobisnis tradisional modern barabai di kabupaten hulu sungai tengah”. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik<sup>12</sup> Universitas Lambung Mangkurat.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengambilan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk wawancara, peneliti menggunakan teknik wawancara semistruktur, yang

---

<sup>14</sup> Abd. Rahman, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”. Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi.

memungkinkan informan untuk memberikan pendapat secara lebih terbuka.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pembangunan Pasar Agrobisnis Tradisional Modern Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum optimal. Terdapat dua masalah utama yang diidentifikasi, yaitu kurangnya akuntabilitas dan keterbukaan. Selain itu, terdapat tiga faktor penghambat yang memengaruhi penerapan *good governance*, yaitu: a. Faktor Keuangan Daerah, keterbatasan dana yang mempengaruhi pencapaian *good governance*. b. Partisipasi Masyarakat, rendahnya keterlibatan masyarakat, terutama pedagang, dalam proses pembangunan. c. Penegakan Hukum yang Lemah, ketidakjelasan dan ketidaktegasan dalam penegakan hukum yang menghambat tujuan pembangunan. Penelitian ini menekankan perlunya perbaikan dalam aspek keuangan, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum untuk mencapai *good governance* yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan pengembangan pasar.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang diteliti adalah sama-sama membahas tentang *good governance*, metode penelitian sama-sama kualitatif dan teknik pengumpulan datanya juga memakai wawancara, observasi dan dokumentasi. Perbedaannya terletak pada objek dan lokasi penelitiannya.

---

<sup>15</sup> Arbainah, "Good Governance dalam pembangunan pasar agrobisnis tradisional modern barabai di kabupaten hulu sungai tengah". Fakultas Ilmu Sosial dan Politik12 Universitas Lambung Mangkurat.

10. Ayyu Ainin Mustafidah, “Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Mustahiq Di BAZNAS Kabupaten Lumajang”. Uin Khas Jember, *Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance* Vol. 4, No. 2, Desember 2021

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan data dan informasi berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Lumajang melibatkan beberapa prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti kurangnya kepercayaan masyarakat, kurangnya peran ulama, dan belum adanya peraturan daerah yang mengatur penyaluran zakat. Penelitian ini juga merekomendasikan perlunya sosialisasi mengenai keberadaan BAZNAS dan dukungan dari ulama untuk meningkatkan efektivitas penyaluran zakat.

Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengambilan datanya memakai wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian tersebut juga memakai prinsip-prinsip *good*

*governance* didalam pembahasannya. Perbedaanya adalah penelitian tersebut menerapkan prinsip-prinsip *good governance* pada pengelolaan zakat sedangkan penelitian yang sedang diteliti menerapkannya dalam tata kelola pasar tradisional.

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Ipan Nurhidayat, “prinsip-prinsip <i>good governance</i> di indonesia”. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Tasikmalaya, Indonesia. 2023.	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, serta topik pembahasannya sama-sama membahas <i>good governance</i> .	penelitian ini hanya focus kepada prinsip-prinsip <i>good governance</i> Indonesia, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memfokuskan topic tersebut dengan revitalisasi.
2.	Sjahrudin Rasul, “Penerapan <i>Good Governance</i> Di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”.	Sama-sama membahas penerapan <i>good governance</i> , teknik pengumpulan datanya juga memakai wawancara dan doumentasi.	Penelitian ini berfokus pada <i>good governance</i> dalam aspek hukum, sedangkan penelitian yang diteliti memfokuskan penelitian pada <i>good governance</i> dalam aspek ekonomi dan sosial yaitu revitalisasi pasar .
3.	A Teras Narang, “kajian implementasi <i>good and clean governance</i> di provinsi Kalimantan tengah”. Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular. 2021	Sama-sama penelitian kualitatif dan topik pembahasan yang sama yaitu <i>good governance</i> .	perbedaan subjek dari topik pembahasannya, penelitian yang sedang diteliti memfokuskan topik <i>good governance</i> dalam cakupan revitalisasi.

No	Nama, Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan
4.	Erfan Hidayat, Teguh Pramono, Imam Fachruddin, Fendy Artha Prissando <sup>4</sup> , “penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik pada dinas perdagangan kabupaten Kediri. Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kediri. 2023.	teknik pengambilan data yang menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, topik yang digunakan juga sama yaitu penerapan prinsip <i>good governance</i> .	penelitian tersebut fokus pembahasannya penerapan <i>good governance</i> dalam pelayanan publik dinas perdagangan, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas penerapan pada pasar setelah revitalisasi.
5.	Hikmatyas, mimin sundari nasution, “ <i>good governance</i> dalam relokasi pasar selodang kelapa di kabupaten indragili hilir”. Universitas Riau. 2023	metode dan teknik pengumpulan datanya, juga topik pembahasan yang diteliti sama yaitu <i>good governance</i> dalam lingkup pasar.	penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan dan fenomena yang diambil adalah revitalisasi
6.	Putu deny adistanaya, “implementasi peraturan walikota nomor 9 tahun 2009 dalam revitalisasi pasar tradisional di kota Denpasar”. Fakultas hukum universitas warmadewa Denpasar bali indoesia. 2021	teknik pengambilan datanya sama-sama menggunakan wawancara dan meneliti tentang revitalisasi pasar tradisional.	teknik pengambilan datanya sama-sama menggunakan wawancara dan meneliti tentang revitalisasi pasar tradisional.
7.	Abd. Rohman, “revitalisasi pasar rakyat sebagai upaya menjaga eksistensi pasar tradisional”. Program studi administrasi publik universitas tribhuwana tunggadewi Indonesia. 2023.	metode penelitian yang sama yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, serta topik pembahasan sama tentang revitalisasi pasar tradisional.	Penelitian tersebut fokus membahas revitalisasi saja, sedangkan penelitian yang diteliti membahas revitalisasi dalam aspek <i>good governance</i> .
8.	Abd. Rahman, “Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam	metode penelitian dan teknik pengumpulan data	penelitian tersebut fokus membahas penerapan <i>good</i>

No	Nama, Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”. Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi.	yang sama yaitu metode kualitatif dengan teknik trigulasi, juga topik pembahasan yang sama yaitu <i>good governance</i>	<i>governance</i> di bidang pelayanan publik, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan membahas penerapan <i>good governance</i> di pasar tradisional
9.	Arbainah, “ <i>Good Governance</i> dalam pembangunan pasar agrobisnis tradisional modern barabai di kabupaten hulu sungai tengah”. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lambung Mangkurat. 2020	sama-sama membahas tentang <i>good governance</i> , metode penelitian sama-sama kualitatif dan teknik pengumpulan datanya juga memakai wawancara, observasi dan dokumentasi.	Perbedaannya terletak pada objek dan lokasi penelitiannya.
10.	Ayyu Ainin Mustafidah, “Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Mustahiq Di BAZNAS Kabupaten Lumajang”. Uin Khas Jember, <i>Indonesian Journal of Islamic Economics &amp; Finance</i> Vol. 4, No. 2, Desember 2021.	sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengambilan datanya memakai wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian tersebut juga memakai prinsip-prinsip <i>good governance</i> didalam pembahasannya.	Perbedaannya adalah penelitian tersebut menerapkan prinsip-prinsip <i>good governance</i> pada pengelolaan zakat sedangkan penelitian yang sedang diteliti menerapkannya dalam tata kelola pasar tradisional.

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam kajian *good governance* dengan fokus pada implementasinya di pasar tradisional pasca revitalisasi. Keunikan penelitian ini terletak pada beberapa aspek. Studi ini tidak hanya menilai penerapan *good governance* secara umum, tetapi secara



spesifik mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip *good governance* diterapkan setelah pasar tradisional mengalami revitalisasi. Hal ini memberikan perspektif baru mengenai dampak perubahan infrastruktur dan manajemen terhadap tata kelola pasar. Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya yang sering berfokus pada kebijakan pemerintah atau pengelola pasar, penelitian ini mengadopsi pendekatan *multi-stockholder* dengan melibatkan pedagang dan konsumen dalam menilai efektivitas implementasi *good governance*. Metode kualitatif deskriptif yang digunakan di penelitian ini menawarkan metode yang lebih relevan, kontekstual dan komprehensif dibandingkan dengan penelitian sebelumnya terkait implementasi *good governance* di sektor informal seperti pasar tradisional.

## B. Kajian Teori

### 1. *Good Governance*

#### a. Pengertian *good governance*

Istilah *governance* merefleksikan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang mencakup dan mampu menangani semua isu-isu. *Good governance* secara umum memiliki pengertian sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan nilai-nilai dan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut di dalam tindakan dan kehidupan sehari-hari.<sup>16</sup> *good governance* didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab,

<sup>16</sup> Juanda Nawawi, embangun kepercayaan dalam mewujudkan *good governance*, jurnal ilmiah ilmu pemerintahan, vol. 1 No. 3, 2022.

serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.<sup>17</sup> Menurut *World Bank*, *good governance* diartikan sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development society*”. Dari pengertian tersebut diperoleh gambaran bahwa “*governance*” adalah cara, yakni cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber-sumber daya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat.<sup>18</sup>

Penerapan prinsip *good governance* di pasar tradisional dimulai pada tahun 1990-an. Penerapannya didorong oleh adanya kesadaran akan kebutuhan reformasi tata kelola pemerintahan secara umum di berbagai sektor, termasuk pasar tradisional. Dipopulerkan pertama kali oleh bank dunia, yang didasari oleh anggapan bahwa tata kelola yang buruk adalah penyebab utama kegagalan program bantuan pembangunan di Negara-negara berkembang. Di Indonesia, konsep ini kemudian diadopsi dalam berbagai kebijakan publik untuk mendorong lingkungan yang kondusif bagi kegiatan masyarakat, termasuk di pasar tradisional.<sup>19</sup>

#### b. Prinsip-prinsip *good governance*

Menurut Bank Dunia, terdapat empat prinsip utama yang terpenting dalam *good governance*. Empat prinsip tersebut adalah

<sup>17</sup> Mendrofa, Syah Abadi, et al. *Good Governance Melalui Publik Digital*. Mega Press Nusantara, 2024.

<sup>18</sup> Aminuddin Ilmar, S. H. *Hukum tata pemerintahan*. Prenada Media, 2016.

<sup>19</sup> United Cities and Local Governments Asia-Pasific, *Good Governance definition and characteristics*, November 2021.

*Accountability, Participation, Predictability (rule of law), Transparency.*<sup>20</sup>

- 1) Akuntabilitas (*Accountability*) Tanggung jawab seorang pemimpin publik yang sudah diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengurus segala kepentingan yang dilakukan.
- 2) Partisipasi Masyarakat (*Society Participation*) Bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam mengikuti rangkaian kegiatan yang dapat dilakukan melalui penyampaian pendapat serta mengambil keputusan baik secara langsung maupun instansi yang dapat mewakili kepentingan mereka.
- 3) Tegaknya Supremasi Hukum (*Rule of Law*) Dalam proses politik, masyarakat membutuhkan metode dan aturan hukum dalam pembuatan kebijakan publik demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Kerangka hukum seharusnya bersifat tidak memihak dan tidak diskriminatif, termasuk hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
- 4) Transparansi (*Transparency*) Suatu prinsip dasar yang dibangun untuk mendapatkan informasi tentang kepentingan umum baik secara langsung dan dapat diukur berdasarkan sulitnya akses masyarakat terhadap informasi.

<sup>20</sup> Rahayuningsih, Tri Widyawati, Irawaty Igrisa, and Ismet Sulila. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1.10 (2024): 1-5.

## 2. Revitalisasi pasar

### a. pengertian revitalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) revitalisasi merupakan proses, cara dan perbuatan memvitalkan (menjadi vital). Sedangkan vital sendiri mempunyai arti penting atau perlu sekali (untuk kehidupan dan sebagainya). Fokus utamanya pada struktur manajemen yang harus dikelola dengan baik oleh aktor yang berkompeten, serta polanya mengikuti perubahan-perubahan, sehingga benar jika konsep revitalisasi mengacu pada program pembangunan.<sup>21</sup> Revitalisasi secara umum dapat diartikan sebagai upaya untuk menghidupkan kembali atau memulihkan vitalitas suatu area, bangunan, atau bahkan konsep yang sebelumnya mengalami penurunan kualitas, fungsi, atau daya tarik. Proses ini melibatkan berbagai tindakan terencana dan terkoordinasi untuk memperbaiki, memperbarui, dan meningkatkan aspek-aspek tertentu agar kembali relevan dan berfungsi optimal. Revitalisasi adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya sehingga revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan untuk menjadi vital, sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau sangat diperlukan sekali untuk kehidupan dan sebagainya. Revitalisasi dapat berbentuk tahapan proses, cara, strategi menghidupkan atau menghidupkan kembali dari perencanaan awal yang belum tercapai.

---

<sup>21</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. .

Secara luas dan mendasar arti dari kata revitalisasi adalah menghidupkan dan menggiatkan kembali factor-faktor pembangunan (tanah, tenaga kerja, modal, keterampilan dan kewirauhaan, ditambah kelembagaan keuangan birokrasi, serta didukung sarana prasarana fisikdan para pelaku pembangunan untuk menakomodasikan secara structural dan fungsional tantangan, juga kebutuhan baru. Menurut peraturan mentri pekerjaan umum no.18 tahun 2010, revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan/kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya( kawasan yang dimaksud adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya dalam pasal 1 ayat 4).<sup>22</sup>

b. pengertian revitalisasi pasar tradisional

Revitalisasi pasar merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah dan pihak terkait untuk memperbaiki infrastruktur dan pelayanan di pasar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya tarik pasar, baik bagi pedagang maupun pengunjung. Proses ini seringkali melibatkan perubahan fisik dan non-fisik, termasuk penataan ulang tata letak, penyediaan fasilitas umum, dan peningkatan sistem manajemen pasar. Revitalisasi pasar adalah upaya komprehensif untuk menghidupkan kembali, memodernisasi, dan meningkatkan daya saing pasar tradisional agar tetap relevan dan mampu bersaing dengan pasar modern. Proses ini tidak hanya mencakup perbaikan fisik, tetapi juga

<sup>22</sup> Yarangga, Novri Oktovianus, Yannice LM Sitorus, and Musfira Musfira. "Revitalisasi Kawasan Bersejarah Sebagai Objek Wisata Di Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel." *Jurnal Median Arsitektur Dan Planologi* 11.2 (2021).

peningkatan manajemen, pemberdayaan pedagang, dan penyesuaian dengan kebutuhan konsumen yang terus berubah. Revitalisasi pasar adalah kegiatan untuk memperbaiki atau membangun sarana dan prasarana pasar, dengan tujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pasar. Revitalisasi pasar adalah kegiatan membangun atau memperbaiki sarana dan prasarana pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi.

Revitalisasi pasar tradisional bertujuan meningkatkan pasar tradisional agar tetap bisa bersaing dengan pasar modern. Dasar pertimbangan melakukan kerjasama merevitalisasi pasar tradisional antara lain berubahnya pandangan pasar dari tempat interaksi ekonomi menjadi ruang publik, yang difokuskan pada upaya memperbaiki jalur distribusi komoditas yang diperjualbelikan. Fungsi pembangunan pasar juga diharapkan tidak hanya mencari keuntungan finansial dan merupakan langkah untuk meningkatkan perekonomian perdagangan kecil serta perlu melibatkan pengembang untuk dikelola secara kreatif.

Hal yang mendasari bahwa revitalisasi pasar tradisional ini erat hubungannya dengan good governance karena revitalisasi mendukung penuh pelaksanaan good governance. Konsep good governance adalah tata kelola yang baik yang berupaya memenuhi harapan-harapan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan. Pernyataan tersebut sejalan dengan upaya pembangunan, khususnya pembangunan daerah yang berdasarkan dari manajemen tata kelola pemerintahan

daerah setempat yang baik dan bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Model Revitalisasi Multidimensi

keberhasilan atau proses revitalisasi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek atau dimensi kunci, yaitu:

1. Revitalisasi fisik / *physical*

Fokus utamanya berupa pembangunan ulang, penataan kios/los, kebersihan, toilet, area parkir, dan infrastruktur umum seperti listrik, air.

2. Revitalisasi Ekonomi / *economic*

Fokus utamanya peningkatan transaksi, pengelolaan retribusi yang efektif, akses permodalan bagi pedagang, dan peningkatan daya saing pasar.

3. Revitalisasi Sosial/Kultural (*Social/Cultural*)

Fokus utamanya menciptakan suasana pasar yang aman, nyaman, dan harmonis; meningkatkan citra pasar; serta membina hubungan antara pengelola, pedagang, dan konsumen.

4. Revitalisasi Manajemen/Kelembagaan (*Management/Institutional*)

Perbaikan sistem tata kelola, peningkatan kapasitas seperti sumber daya manusia (SDM) pengelola pasar, dan penyusunan kebijakan/peraturan pasar yang adaptif.<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Dahnelia, A., Widiyanto, M. K., & Ismail, H. Efektivitas Implementasi Kebijakan Revitalisasi Dalam Meningkatkan Daya Saing Pasar Rakyat Di Kota Surabaya. Jurnal Penelitian Administrasi Publik 194-207, 2025.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yakni dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya tindakan, perilaku, persepsi, dan lain sebagainya.<sup>24</sup> Adapun penelitian kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan suatu kondisi atau peristiwa yang terjadi pada saat penelitian dilakukan.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun secara langsung ke lapangan untuk mengamati dan menggali informasi dari sumber terkait. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai penerapan *good governance* di pasar tradisional pasca revitalisasi dengan studi kasus pasar mangli jember.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukannya suatu kegiatan penelitian. Sesuai judul penelitian ini, maka lokasi penelitian yang dilakukan adalah pasar mangli jember. Lokasi pasar Mangli berada sebelah jalan protokol di Jl. Hayam Wuruk No.221, Karang Miuwo, Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

---

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), 309.



### C. Subyek Penelitian

Penentuan subyek dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Teknik ini memilih dan menentukan informan dengan pertimbangan pertimbangan yang telah ditentukan. Teknik *purposive* merupakan teknik pengambilan sumber data yang dilandasi tujuan atau pertimbangan terlebih dahulu.<sup>25</sup> Pertimbangan tersebut adalah terkait informan yang dianggap paham tentang segala hal yang berkaitan dengan pasar mangli. Dalam penelitian ini, subyek penelitian atau informan yang terlibat antara lain:

#### a. Pengelola Pasar

1. Bapak Wiyono : Pembantu Bendahara Pasar Mangli Jember
2. Ibu Ririn : Staf pasar mangli jember

#### b. Pedagang

1. Bapak Said
2. Bapak Wahab
3. Ibu Fatimah
4. Ibu Agus
5. Ibu Ida
6. Ibu Rasyid

#### c. Pengunjung

1. Ibu Iis
2. Ibu Sundari
3. Ibu Siti

---

<sup>25</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta:Prenada Media, 2016), 215.

#### 4. Ibu Aminah

Informan tersebut dipilih oleh peneliti Karena merupakan pelaku-pelaku utama dalam lingkup pasar. Dalam proses pelaksanaan revitalisasi pasar, semua pelaku utama pasar ikut andil didalamnya. prinsip-prinsip Good Governance juga menjelaskan bahwa ada keikutsertaan masyarakat dan pemerintah atau pengelola setempat dalam penerapannya.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang dikumpulkan merujuk pada focus penelitian, adapun karakteristik pendukung yakni berupa surat atau dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode dalam proses pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

##### 1. Observasi

Observasi adalah metode yang dilakukan guna mendapatkan sebuah data, dengan pengamatan yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas terhadap fenomena yang akan diteliti terkait dengan keadaan di lapangan. Dalam melakukan teknik observasi ini, peneliti melakukan pengamatan di lokasi tempat peneliti untuk menggali dan mengumpulkan informasi serta mencatat hal hal yang menjadi fokus permasalahan. Jenis observasi yang digunakan peneliti ialah menggunakan metode observasi non-partisipatif. Peneliti menggunakan observasi non partisipatif karena dalam penelitiannya peneliti tidak ikut

andil dalam segala kegiatan atau kehidupan yang dilakukan oleh subyek penelitian.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, dengan cara terjun secara langsung ke lapangan dan bertemu dengan subyek penelitian untuk menggali informasi melalui tanya jawab sehingga nantinya mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta maupun keinginan yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara terstruktur, maksudnya yaitu peneliti telah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk diajukan kepada informan. Akan tetapi, peneliti juga masih memperdalam pertanyaan yang sudah tersedia agar data yang didapat lebih jelas dan berkaitan dengan penelitian tersebut.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan dalam membantu penelitian dengan mengumpulkan informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian, melalui bahan tulisan seperti surat-surat, pernyataan tertulis, dan dokumen-dokumen lainnya.

Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk melengkapi data yang telah didapatkan dari observasi dan wawancara yang berupa foto, catatan lapangan, dan lain-lain yang terkait dengan fokus penelitian.<sup>26</sup>

#### **E. Analisis Data**

Analisis data merupakan hal yang diperlukan dalam mencari dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Kemudian hasil dari data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi akan disajikan dalam bentuk kata dan kalimat. Adapun tahapan-tahapannya antara lain:

##### **1. Pengumpulan data**

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, atau gabungan dari ketiganya (triangulasi). Pada tahap awal penelitian melakukan penjelajah secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar. Dengan demikian, peneliti akan memperoleh data yang bervariasi.

---

<sup>26</sup> Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 67-114.

## 2. Reduksi data

Mereduksi data artinya adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

## 3. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dalam mengolah informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian di lapangan dalam bentuk teks yang bersifat naratif dan diubah menjadi uraian singkat, bagan, hubungan-hubungan antar kategori dan sebagainya yang kemudian disusun untuk menggabungkan informasi sehingga akan memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

## 4. Menarik kesimpulan

Dalam hal ini, peneliti berupaya untuk memberi gambaran mengenai bagaimana implementasi good governance di pasar tradisional Mangli pasca revitalisasi.

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan agar data yang diperoleh dalam penelitian dapat menjadi data yang terpercaya dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Pemeriksaan terhadap keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi.

Triangulasi merupakan suatu teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data dengan melakukan perbandingan terhadap data yang didapatkan. Adapun teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data dengan melakukan perbandingan terhadap informasi yang telah didapatkan dengan sumber yang berbeda.<sup>27</sup> triangulasi sumber bisa dilakukan dengan cara berikut:

1. Trigulasi wawancara dengan berbagai sumber

Mewawancarai beberapa pihak yang memiliki perspektif berbeda terkait implementasi good governance, misalnya: pemerintah daerah, pengelola pasar, pedagang dan pengunjung.

2. Trigulasi dengan dokumen dan data sekunder

Peraturan daerah atau kebijakan terkait pasar tradisional. Untuk melihat apakah kebijakan mendukung prinsip good governance.

Laporan resmi atau data dari dinas terkait. Misalnya, laporan kinerja pasar sebelum dan sesudah revitalisasi.

Berita atau publikasi tentang revitalisasi Pasar Mangli. Untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan diberitakan dan apakah ada kritik atau dukungan dari publik.

3. Trigulasi observasi lapangan

Mengamati langsung bagaimana tata kelola pasar setelah revitalisasi.

---

<sup>27</sup> Zurich Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (GV Syakir Media Press,2021), 159-172.

Melihat apakah ada transparansi dalam sistem retribusi, fasilitas yang disediakan, serta interaksi antara pengelola dan pedagang.

Membandingkan kondisi pasar sebelum dan sesudah revitalisasi untuk mengidentifikasi perubahan nyata.

### **G. Tahap – Tahap Penelitian**

Bagian tahap-tahap penelitian ini menguraikan proses pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, penelitian sebenarnya, dan sampai pada akhir penelitian Tahapan penelitian tersebut antara lain:

1. Penelitian pendahuluan (pra riset)
  - a. Menentukan judul penelitian.
  - b. Membuat matrik penelitian.
  - c. Menyusun proposal.
  - d. Mengurus dan menyiapkan surat perizinan penelitian lapangan
  - e. Menyiapkan sesuatu yang dibutuhkan pada penelitian.
2. Penelitian sebenarnya (riset)
  - a. Pengumpulan kelengkapan data yang dibutuhkan.
  - b. Menuju ke lokasi penelitian dan melaksanakan observasi wawancara serta dokumentasi.
  - c. Memilih dan memilah data yang sesuai dengan fokus penelitian.
  - d. Melakukan analisis data dengan cara yang telah ditetapkan.
  - e. Menarik kesimpulan.

3. Akhir penelitian (pasca riset)

- a. Konsultasi ke pembimbing.
- b. Melakukan revisi.
- c. Melaksanakan ujian akhir skripsi.
- d. Melakukan penjurian, dan lain sebagainya





## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pasar mangli jember. fokus kajian yang penulis teliti adalah mengenai implementasi *good governance* di pasar tradisional mangli jember pasca revitalisasi. Untuk memperoleh pemahaman terperinci mengenai objek penelitian, berikut penulis menggambarkan mengenai pasar mangli jember sebagai berikut:

##### 1. Gambaran Umum Pasar Mangli Jember

###### a. Sejarah dan lokasi Pasar Mangli Jember

Pasar Mangli, yang berdiri sejak tahun 1976. Pasar mangli menjadi pusat perdagangan berbagai kebutuhan pokok dan barang lainnya di dekat pusat kota jember juga menjadi titik temu kegiatan ekonomi di desa mangli dan sekitarnya. Beralamat di jalan Brawijaya No. 1, Karang Mluwo, Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, 68151. Telah mengalami proses revitalisasi guna meningkatkan daya tarik dan kesejahteraan masyarakat setempat. Pasar mangli merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di kabupaten jember yang memiliki potensi untuk dikembangkan oleh pemerintah.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Siskaperbapo.jatimprov.go.id.

b. Demografi pasar mangli

Berdasarkan profil pasar mangli jember secara keseluruhan memiliki luas wilayah 2.473 m<sup>2</sup>, jam oprsionalnya dimulai pada pukul 03.00 WIB s/d 08.00 WIB. Jumlah toko 20 unit, kios 7 unit, los 114 unit, dan lesehan 15 unit.

c. Revitalisasi Pasar Mangli

Pasar mangli termasuk kedalam program pemerintah kerja bupati untuk merevitalisasi pasar-pasar yang ada di jember. Seperti yang diungkapkan oleh bapak wiyono, bahwa:

"Revitalisasi ini sebenarnya bagian dari program strategis Bupati untuk mengangkat martabat pasar tradisional. Dulu Pasar Mangli ini citranya kotor dan kumuh, sehingga masyarakat kadang enggan datang. Dengan membangun gedung menjadi dua lantai, kami ingin membuktikan bahwa pasar tradisional pun bisa bersih, nyaman, dan fasilitasnya tidak kalah saing dengan pasar modern."<sup>29</sup>

Revitalisasi dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2018 dan 2022. Pada tahun 2018 revitalisasi yang dilakukan berupa pemasangan paving dan perluasan wilayah pasar dibagian belakang. Lalu pada tahun 2022, revitalisasi yang dilakukan berupa penambahan kios-kios baru, pembangunan lantai dua, pemasangan paving baru serta renovasi kantor.<sup>30</sup>

revitalisasi adalah upaya komprehensif untuk menghidupkan kembali dan meningkatkan daya saing pasar tradisional , revitalisasi di Pasar Mangli mencakup intervensi fisik (pembangunan gedung) dan

<sup>29</sup> Wawancara, 29 april 2025.

<sup>30</sup> Wiyono, Wawancara 29 April 2025.

non-fisik (perbaikan manajemen) agar tetap relevan dengan kebutuhan konsumen.



Gambar 4.1 Pasar Mangli sebelum dan sesudah revitalisasi

## B. Penyajian Data Dan Analisis

Proses selanjutnya dari skripsi ini adalah menyajikan hasil data yang diperoleh selama penelitian. Setelah melakukan proses pengumpulan data dilapangan, sehingga dirasa cukup data yang diperoleh maka penelitian bisa dihentikan. Data –data yang merupakan hasil yang sudah disesuaikan dengan alat –alat pengumpulan data, maka kemudian dijelaskan secara rinci sesuai dengan bukti-bukti yang diperoleh selama penelitian.

Data-data yang diperoleh disajikan dan dianalisis sebagai berikut :

### 1. Implementasi *good governance* di pasar mangli jember sebelum dan sesudah revitalisasi

Penerapan prinsip *good governance* menjadi semakin penting dalam konteks pengelolaan sumber daya publik, termasuk di sektor pasar

tradisional. Seperti Pasar mangli sebagai salah satu pasar yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>31</sup>

Sebagaimana yang di ungkapkan bapak wiyono selaku pembantu bendahara pasar mangli jember, sebagai berikut :

“pasar mangli ini kan memiliki banyak potensi sayang kalo tidak dikelola dan diurus dengan baik, karena itu saya selalu berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai agar bisa membuat pasar mangli lebih berkembang, salah satunya ya mengajukan revitalisasi ataupun program pengembangan pasar kepada pemkab.”<sup>32</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu ririn, beliau berpendapat:

"pasar mangli ini memiliki letak yang strategis disamping jalan raya lintas provinsi, transaksi yang ada juga banyak setiap harinya. Banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan disini."<sup>33</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas, pasar mangli yang memiliki lokasi strategis, beragam komoditas dan jumlah pedagang yang relatif banyak. Akan sangat sia-sia jika dibiarkan dalam manajemen atau tata kelola yang buruk. Upaya peningkatan sarana dan prasarana seperti perbaikan jalan dan lantai, serta perbaikan kio-kios merupakan langkah yang baik untuk meningkatkan kualitas hidup dan efisiensi pasar. Pengajuan revitalisasi kepada pemerintah pusat juga merupakan upaya yang bagus untuk meningkatkan perkembangan pasar.

<sup>31</sup> SN, Elca Maghfiro, and Anwar Rosshad. Tata Kelola Pemerintahan Dalam Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Induk Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Diss. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025.

<sup>32</sup> Wiyono, wawancara, 28 april 2025.

<sup>33</sup> Ririn, wawancara 16 desember 2025.

Membuat pasar lebih berkembang berarti meningkatkan daya saing, volume transaksi, kesejahteraan pedagang dan pendapatan daerah.<sup>34</sup> Upaya yang sudah dilakukan dibuktikan dengan keadaan pasar mangli setelah revitalisasi yang jauh lebih baik dan nyaman. Sarana dan prasarana serta fasilitas yang ada bagus dan memudahkan masyarakat ketika berbelanja di pasar mangli.

Konsep *Good Governance*, masih di anggap awam dan sulit dipahami, terutama oleh pedagang di Pasar Mangli. Mengganti bahasa asingnya dengan praktik dan manfaat nyata yang relevan dengan aktivitas harian pedagang, bisa mempermudah mereka mengerti maksud dari *good governance*. seperti contohnya untuk memahami prinsip transparansi yang bisa berupa keterbukaan uang iuran pasar, Pedagang tahu persis berapa iuran (retribusi) yang dibayar, dan uang itu dipakai untuk apa saja (kebersihan, listrik, perbaikan atap). Ini dapat menghilangkan kecurigaan.

Penerapan *good governance* pada tata kelola pasar mangli yang sudah diterapkan dengan baik, bapak wiyono selaku pembantu bendahara pasar mengungkapkan di dalam wawancara :

“sejak dulu saya selalu berusaha melibatkan semua pelaku pasar dalam pengambilan keputusan dan kepentingan yang menyangkut pasar, bisa dikatakan pasar mangli menerapkan prinsip-prinsip governance (akuntabilitas, partisipasi masyarakat, supremasi hukum dan transparansi)”<sup>35</sup>

Bapak wahab, salah satu pedagang di pasar juga berpendapat :

<sup>34</sup> Fachruzzaman, Fachruzzaman, "Pembentukan Perumda Pasar Guna Mendorong Perekonomian Daerah." Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Indonesia (2024): 104-112.

<sup>35</sup> Wiyono, wawancara april 2025.

"pedagang selalu dilibatkan, soal aturan ataupun urusan oprasional pasar lainnya, biasanya selalu ada perwakilan dari pedagang untuk ikut wawancara atau diskusi dengan bapak pengelola."<sup>36</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, bahwa penerapan prinsip *good governance* di pasar mangli sudah diterapkan, pengambilan keputusan penting terkait pengelolaan pasar seperti jam oprasional, penentuan lokasi dagang dan besaran redistribusi tidak dibuat secara sepihak oleh pengelola, tetapi melalui musyawarah atau forum dialog yang melibatkan pedagang, perwakilan pembeli, dan pengelola. Pasar mangli ini tidak hanya fokus pada perbaikan fisik seperti revitalisasi tetapi juga melaksanakan reformasi menejemen dengan menjadikan pelibatan masyarakat sebagai pilar utama.

Tata kelola Pasar Mangli sebelum dilakukan revitalisasi memiliki beberapa karakteristik yang identik dengan pengelolaan pasar tradisional pada umumnya yang belum tertata secara profesional. prinsip *good governance* juga sudah diterapkan dan berjalan optimal. Dahulu, secara fisik pasar mangli ini identik dengan kesan kotor, kumuh dan tat ruang pasar yang terbatas. Bangunan hanya terdiri dari satu lantai saja dan kios-kios yang tersedia terbatas. Mengenai hal ini, ibu ririn mengungkapkan bahwa:

"pasar mangli ini kan pasar tradisional, dulu kondisinya bisa dikatakan kurang layak karna kotor dan fasilitasnya kurang memadai. *Good governance* sudah diterapkan, pengelola selalu berupaya supaya pasar ini menjadi lebih baik. "<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Wahab, wawancara april 2025.

<sup>37</sup> Ririn, wawancara, 16 desember 2025.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu ida, beliau berpendapat:

"kondisi pasar yang dulu itu kurang nyaman, kotor lantai becek dan kios-kios juga sedikit jadi banyak yang jualan dibawah, untungnya ada perbaikan ini jadi kondisi pasar sudah sangat lebih bagus dari yang dulu." <sup>38</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, sebelum revitalisasi Pasar Mangli memiliki citra negatif sebagai tempat yang kotor, kumuh, dan becek. Revitalisasi telah mengubah kondisi ini menjadi jauh lebih bersih, tertata, dan layak, yang secara signifikan meningkatkan kenyamanan bagi pembeli dan pedagang.

Saat diwawancarai mengenai penerapan *good governance* di pasar mangli, bapak said salah satu pedagang berpendapat:

"sebenarnya sama saja sebelum dan sesudah perbaikan ini, kalo ada apa-apa pedagang selalu diikut sertakan, mungkin beberapa urusan penting yang berhubungan dengan pemerintah saja yang tidak, termasuk revitalisasi atau perbaikan pasar ini sepenuhnya dari pemerintah jadi gak minta pendapat kami selaku pedagang" <sup>39</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak wahab, beliau berpendapat:

"untuk pengelolaan menurut saya sudah bagus baik itu sebelum ataupun sesudah ada program perbaikan ini karna saya merasa perbaikan ini tidak berpengaruh ke tata pengelolaan pasar." <sup>40</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa pasar mangli menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam sistem tata kelolanya. Tetapi saat revitalisasi dilaksanakan tidak adanya partisipasi pedagang dan masyarakat

<sup>38</sup> Ida, wawancara, april 2025.

<sup>39</sup> Said, wawancara 29 april 2025.

<sup>40</sup> Wahab, wawancara 29 april 2025.

didalamnya. Pedagang hanya dilibatkan dalam urusan harian pasar tidak dalam urusan strategis yang berhubungan dengan pemerintah seperti revitalisasi. Peneliti menemukan alasan mengenai hal ini adalah karena revitalisasi yang dilaksanakan di pasar mangli merupakan program pemerintah. Tidak ada campur tangan lain selama prosesnya. Pihak pengelola pasar hanya mengajukan perbaikan dan sisanya semua diserahkan kepada pihak pemerintah sampai selesai.

Dari keempat prinsip utama *good governance* yang diterapkan dalam pengelolaan pasar mangli dapat dijabarkan seperti berikut:

### **1. *Accountability***

Dalam kaitan peran pengelola dalam pengelolaan pasar mangli adalah bentuk tanggung jawab atas kebijakan yang dibuat. Tugas pengelola bukan hanya menjalankan kegiatan harian, tetapi juga mempertanggungjawabkan kebijakan strategis yang telah dirumuskan. Hal tersebut terbukti dengan perwujudan pembangunan pasar yang dibedakan atas tiga tahap, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Adu, Paulus Adrianus. Evaluasi manajemen fasilitas pasar pasca revitalisasi; studi pada pasar tradisonal lolowa atambua. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023.



**Tabel 4.1**  
**Tiga Tahap Pembangunan**

Tahap Pembangunan	Fokus Utama	Kaitan dengan Good Governance
a. Perencanaan	Perumusan tujuan, identifikasi kebutuhan, penentuan anggaran, dan desain teknis revitalisasi.	Transparansi & Partisipasi : Dokumen perencanaan harus terbuka dan idealnya melibatkan masukan dari pedagang.
b. Pelaksanaan	Implementasi rencana, pengadaan barang dan jasa, pengawasan kualitas pekerjaan fisik, dan realisasi anggaran.	Akuntabilitas & Supremasi Hukum: Pengelola bertanggung jawab memastikan pekerjaan sesuai standar, tepat waktu, dan menggunakan dana sesuai regulasi, tidak ada penyelewengan dan penyalahgunaan.
c. Evaluasi	Penilaian kinerja proyek, analisis dampak terhadap ekonomi dan sosial pasar, dan identifikasi pelajaran untuk proyek berikutnya.	Akuntabilitas & Peningkatan Kapasitas: Pengelola wajib melaporkan hasil dan dampak proyek kepada pihak berwenang (Pemkab) dan masyarakat. Evaluasi menjadi dasar perbaikan tata kelola di masa mendatang.

Adanya tiga tahap ini menunjukkan bahwa prosesnya berjalan terstruktur, tetapi, jika pedagang merasa tidak dilibatkan dalam tahap perencanaan dan tidak merasakan perubahan positif pada tata kelola setelah pelaksanaan sesuai pernyataan pedagang sebelumnya, maka yang perlu ditingkatkan bukan hanya keberadaan tahap-tahap tersebut, tetapi kualitas implementasi prinsip *good governance* di setiap tahap.

Misalnya, memastikan partisipasi maksimal pada tahap perencanaan dan evaluasi dampak tata kelola pada tahap Evaluasi.

Beruntungnya dalam hal ini pengelola pasar masih mengajak para pedagang untuk musyawarah terkait penempatan kios – kios agar tepat sasaran dan berfungsi dengan baik. Seperti yang diungkapkan oleh ibu fatimah, selaku pedagang lama di pasar mangli, beliau berpendapat :

“soal revitalisasi ini tidak ada pemberitahuan, hanya saja ada musyawarah terkait penempatan kios – kios baru yang dibangun itu,”<sup>42</sup>

Dalam hal ini, bapak wahab juga berpendapat, beliau mengungkapkan:

"Kalau soal rencana renovasi besar-besaran ini, jujur kami tidak pernah diajak rapat sebelumnya, tahu-tahu gedungnya sudah berdiri dua lantai. Tapi pas bagian pembagian lapak baru, kami dipanggil untuk musyawarah supaya penempatannya sesuai dan tidak ada yang berebutan."<sup>43</sup>

berdasarkan pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa *prinsip good governance* diimplementasikan terlambat dalam siklus proyek.

Tahap perencanaan dalam siklus pembangunan yang diklaim oleh pengelola tidak efektif. Prosedur Perencanaan yang akuntabel seharusnya mencakup konsultasi publik yang mendalam. Keterlibatan yang terlambat ini dapat merusak kepercayaan pedagang, karena mereka mungkin merasa bahwa pandangan mereka hanya dicari untuk

<sup>42</sup> Fatimah, wawancara april 2025.

<sup>43</sup> Wahab, wawancara 29 april 2025.

memuluskan penempatan akhir, bukan untuk membentuk esensi proyek revitalisasi.

## 2. *Participation*

Dalam kaitan pengelolaan Pasar Mangli, konsep partisipasi yang dilakukan pengelola adalah dengan memberikan ruang dalam hal pengambilan keputusan serta memberikan informasi seluas-luasnya bagi pedagang dan masyarakat. Dari bentuk partisipasi dan sejauh mana pengelola melibatkan pedagang dalam revitalisasi pasar Mangli, didapatkanlah kesimpulan bahwasannya keterlibatan atau partisipasi pedagang dalam revitalisasi Pasar Mangli belum diupayakan dengan baik oleh pengelola pasar,

Hal ini dibuktikan dari tindakan pengelola yang tidak melibatkan pedagang dalam menentukan lokasi mana saja yang perlu diperbaiki, serta menyediakan TPS yang bertujuan untuk menjadi tempat sementara bagi pedagang berjualan ketika kios lama diperbaiki. Pedagang juga tidak mendapatkan kesempatan menyampaikan aspirasi secara langsung dan tidak ada keterlibatan pedagang dalam rapat koordinasi penentuan revitalisasi pasar, dengan kurangnya partisipasi pedagang ini menimbulkan kekecewaan dari pedagang karna hasil dari revitalisasi tidak memuaskan mereka.

Ketika diwawancarai mengenai penerapan prinsip *good governance* di pasar mangli, ibu agus selaku pedagang juga berpendapat:

“tidak ada melibatkan pedagang sama sekali, tau - tau sudah jadi saja bangunan disana dan lantai dua.”<sup>44</sup>

Sama halnya dengan ibu agus, bapak said saat diwawancara juga berpendapat, beliau mengungkapkan:

"Sama sekali tidak ada rapat atau omongan ke pedagang kalau mau dibangun gedung baru. Kami tahunya pas proyeknya sudah jalan dan tiba-tiba sudah jadi gedung bertingkat saja."<sup>45</sup>

Dari pernyataan diatas, menunjukan bahwa adanya kegagalan prinsip partisipasi masyarakat. Prinsip Partisipasi menuntut keterlibatan aktif semua stakeholder dalam pengambilan keputusan. Dengan tidak melibatkan pedagang proyek revitalisasi ini beresiko bangunan baru yang dibangun tidak sesuai dengan kebutuhan operasional harian pedagang dan dapat menimbulkan konflik.

### 3. *Predictability (rule of law),*

Keadilan yakni adanya kesempatan yang sama bagi semua warga negara tanpa perbedaan gender dan sebagainya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Keadilan dibangun atas dasar kesamaan / keadilan memberikan pelayanan publik tanpa membedakan gender dan status penerima layanan.<sup>46</sup> Keadilan sangat penting di terapkan karena keadilan itu mencerminkan suatu sikap pemimpin untuk menunjukkan bagaimana *good governance* itu sendiri di terapkan pada suatu instansi.

<sup>44</sup> Ibu agus, wawancara april 2025.

<sup>45</sup> Said, wawancara april 2025.

<sup>46</sup> Teuku, Saiful. Penerapan asas keadilan perspektif gender dalam qanun di aceh. Diss. Universitas andalas, 2021.

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. bagaimana pemerintah memperlakukan masyarakat, Prinsip ini dapat diartikan dengan memberikan pelayanan dan perlakuan kepada publik tanpa membedakan. Keadilan menjelaskan bahwa dalam memberikan pelayanan semua orang berhak memiliki kesempatan yang sama mendapatkan perlakuan yang adil untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Dalam konteks pengelolaan Pasar Mangli Jember, prinsip ini menuntut adanya aturan yang jelas, tertulis, dan ditegakkan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di Pasar Mangli, penerapannya dapat dilihat dari dua sisi: normatif (yang seharusnya) dan faktual (berdasarkan kesaksian pedagang).

Secara ideal penerapan *rule of law* dipasar mangli harus mencakup hal-hal ini yaitu, Adanya peraturan tertulis yang jelas mengenai jam operasional, jenis dagangan yang diizinkan, standar kebersihan, dan kewajiban retribusi dan aturan ini harus disosialisasikan secara merata kepada semua pedagang. Keputusan penting, seperti penentuan lokasi kios atau tarif retribusi, harus didasarkan pada prosedur baku yang tidak berubah-ubah setiap saat. Pedagang harus tahu apa yang akan terjadi jika mereka melanggar atau mematuhi aturan. Sanksi atas pelanggaran (misalnya, berjualan di luar batas atau menunggak iuran) harus diterapkan secara setara kepada semua pedagang, tanpa diskriminasi atau berpihak kepada pedagang

tertentu. Juga sanksi atas pelanggaran (misalnya, berjualan di luar batas atau menunggak iuran) harus diterapkan secara setara kepada semua pedagang, tanpa diskriminasi atau keberpihakan kepada pedagang tertentu.<sup>47</sup>

Mengenai penerapan *rule of law* pada pengelolaan pasar mangli, ibu Ida berpendapat:

“soal aturan jam oprasional,sanksi-sanksi semuanya sudah diterapkan dengan cukup tegas dan jelas. Kami pedagang tidak merasa keberatan dengan adanya aturan itu dan mematuhi.”<sup>48</sup>

Hal serupa juga diungkapkan oleh ibu Fatimah, beliau berkata:

"Semua peraturan di pasar ini, mulai dari jam operasional sampai sanksi-sanksinya, sudah disosialisasikan dengan baik dan ditegakkan tanpa pilih kasih. Kami sebagai pedagang merasa aturan itu adil dan kami patuh pada setiap ketentuannya."

Berdasarkan pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa prinsip *rule of law* di pengelolaan pasar mangli telah berjalan efektif dan diterima dalam oprasional pasar harian. Tetapi menurut penjelasan prinsip-prinsip sebelumnya, prinsip ini gagal dalam konteks revitalisasi, adanya ketidakjelasan informasi dan ketiadaan partisipasi dalam pembangunan kios membuat pedagang tidak dapat memprediksi nasib lapak dan usaha mereka, sehingga melanggar hak mereka untuk

<sup>47</sup> Vira, Febriyanti. Implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2016 tentang retribusi pelayanan pasar di pasar mangaran kabupaten Situbondo. Universitas abdurachman saleh situbondo, 2025.

<sup>48</sup> Wawancara, april 2025.

mendapatkan kepastian hukum atas aset dan mata pencaharian mereka di pasar.

*rule of law* di Pasar Mangli perlu diperkuat dengan memastikan bahwa semua kebijakan, besar maupun kecil, didasarkan pada prosedur yang transparan dan tertulis, serta ditegakkan dengan adil dan partisipatif.

#### 4. *Transparency*

Dalam kaitan dengan pengelolaan Pasar Mangli, transparansi adalah keterbukaan segala informasi terkait pasar, termasuk penarikan retribusi dan biaya pembangunan. Biaya pembangunan akan dimuat dalam papan pengumuman jika semua pembangunan gedung telah selesai, sementara besarnya jumlah retribusi biasanya akan dimuat dalam agenda bulanan di kantor disperindag. Transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai.<sup>49</sup>

Prinsip Transparansi adalah salah satu pilar kunci *Good Governance* yang menuntut adanya keterbukaan informasi mengenai segala kebijakan, prosedur, dan penggunaan sumber daya yang berkaitan dengan kepentingan publik. Tujuannya adalah memastikan

<sup>49</sup> wulandari, lestari. Implementasi transparansi sistem pungutan retribusi pelaku usaha di kecamatan soreang perspektif siyasah maliyah. IAIN ParePare, 2024.

masyarakat (pedagang dan pembeli) dapat mengakses dan memverifikasi keputusan pengelola.<sup>50</sup>

Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya dan adanya komunikasi publik oleh pemerintah. Dalam hal transparansi perlu adanya suatu koordinasi yang dilakukan dalam hal ini mengatur sarana pendukung dalam pasar mangli yang akan direvitalisasi, tentu harus dihadapkannya media komunikasi yang baik antara pedagang dengan pemerintah terkait. Dimana hal tersebut diyakinkan dapat memberikan manfaat berupa upaya yang lebih mudah dalam merealisasikan penempatan pasar yang telah direncanakan pemerintah. Hal itu dapat terjadi dikarenakan adanya kejelasan yang diterima sasaran kebijakan agar meminimalisir kesalahan informasi yang diterima serta disampaikan dalam rangka perealisasi kebijakan.

Dalam pengelolaan pasar tradisional, Transparansi seharusnya diterapkan pada area-area penting berikut:

- a. Transparansi Keuangan: Keterbukaan mengenai besaran retribusi, iuran keamanan/kebersihan, serta alokasi dan penggunaan dana yang terkumpul (misalnya, untuk perbaikan fasilitas atau gaji petugas).
- b. Transparansi Kebijakan dan Aturan: Kebijakan baru, seperti aturan jam operasional dan sanksi, harus tertulis, disosialisasikan, dan mudah diakses oleh semua pedagang.

<sup>50</sup> Rosidah, Idah, Priatna Kesumah, and Royke Bahagia Rizka. "Transparasi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey)." Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi (2023): 137-156.



- c. Transparansi Prosedural (Revitalisasi): Seluruh proses proyek besar (revitalisasi) harus transparan, mencakup latar belakang proyek, anggaran yang diajukan ke Pemkab, pemilihan kontraktor, dan desain akhir bangunan.

Dalam hal ini, ibu agus mengungkapkan dalam wawancara, beliau berpendapat:

"Pihak pengelola sangat disiplin kalau masalah jam operasional dan tata tertib di dalam pasar, semuanya dijelaskan dengan terang-terangan ke pedagang, iuran pasar juga transparan dan jelas. tetapi, untuk kebijakan besar seperti revitalisasi gedung ini, komunikasinya kurang. Kami tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan awalnya, padahal itu kan berdampak besar buat kami." <sup>51</sup>

Ibu ida juga berpenfapat mengenai hal ini, beliau mengungkapkan:

"Sebenarnya pengelolaan di sini sudah cukup bagus, informasinya jelas kalau terkait sanksi atau aturan baru bagi pedagang. Hanya saja, tidak semuanya transparan contohnya revitalisasi itu, tidak ada sosialisasi yang jelas di awal. Kami baru diajak bicara pas gedungnya sudah berdiri dan mau pembagian kios saja." <sup>52</sup>

Dari pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa transparansi di Pasar Mangli belum berjalan secara utuh. Terjadi ketimpangan informasi di mana pengelola sangat terbuka pada hal-hal yang bersifat operasional harian seperti iuran, sanksi, dan tata tertib, namun sangat

<sup>51</sup> Ibu agus, wawancara 29 april 2025.

<sup>52</sup> Ibu ida, wawancara 30 april 2025.

tertutup pada hal yang bersifat strategis seperti proyek revitalisasi dan pembangunan gedung.

Dari hasil wawancara pada prinsip-prinsip *good governance* sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Transparansi di Pasar Mangli termasuk sebagai transparansi yang parsial. Pengelola telah berhasil menerapkan keterbukaan dan kejelasan pada tingkat operasional rutin, yang sangat diapresiasi oleh pedagang dan mendukung *Rule of Law* (ketertiban). Tetapi, pada tingkat strategis dan kebijakan publik (terkait pembangunan yang melibatkan dana besar), prinsip Transparansi gagal diimplementasikan. Ketiadaan pemberitahuan di awal proyek penting dan besar yang merusak kepercayaan, menghambat fungsi pengawasan sosial, dan mengarah pada proyek top-down yang bertentangan dengan konsep *Good Governance* yang seutuhnya.

## **2. Tantangan dari implementasi *good governance* di pasar tradisional mangli jember.**

Dalam penerapan *good governance* di pasar tradisional, pasti terdapat banyak tantangan yang dihadapi. Tantangan dalam tata kelola pasar pasca revitalisasi dapat berupa adanya perubahan perilaku, membutuhkan waktu bagi pedagang dan pengunjung untuk menyesuaikan diri dengan perubahan setelah revitalisasi. Adanya persaingan dengan pasar modern atau pusat perbelanjaan. Kebutuhan konsumen juga pasti terus berubah, sehingga pengelola pasar harus mampu beradaptasi. Dengan menerapkan *good governance*, pasar pasca revitalisasi dapat menjadi pusat

aktivitas ekonomi yang dinamis dan berkelanjutan, serta menjadi kebanggaan bagi masyarakat.<sup>53</sup>

Dalam wawancara bapak wiyono menjelaskan tantangan yang dihadapi saat menerapkan prinsip *good governance* pasca revitalisasi di pasar mangli :

“tantangan yang dihadapi lumayan banyak, hal pertama yang sampai sekarang masih sering terjadi itu memberi pemahaman tentang *good governance* kepada pedagang, ketika musyawarah mereka bingung dengan maksud yang disampaikan. Mempertahankan kualitas pasar agar tidak kalah saing dengan pasar modern. Menjaga fasilitas-fasilitas baru tetap terawat dan berfungsi dengan baik.”<sup>54</sup>

Mengenai hal ini bapak wahab salah satu pedagang mengungkapkan:

"Masalah paling besar sekarang itu bagaimana menjaga pasar yang sudah bagus ini tetap terawat. Kami sering diingatkan pengelola soal fasilitas baru ini, tapi kadang masih ada yang kurang paham. Harapan kami sih fasilitas ini jangan sampai cepat rusak supaya pembeli lebih senang datang ke sini daripada ke pasar modern, ya walaupun agak kecewa karna tidak semua fasilitas baru yang ada sesuai dngan kebutuhan kami, semoga pihak pengelola segera menindaklanjuti hal tersebut."<sup>55</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa keberhasilan pasar tradisional sangat bergantung pada kemampuan pengelola untuk menyelaraskan antara kebijakan pemerintah yaitu *good governance*, kebutuhan pasar dan pemeliharaan pasar. Memberi pengertian

<sup>53</sup> Hidayat, Iqbal. Penerapan Strategi Peralihan Aktivitas Pasar dari Pasar Transit Ke Pasar Relokasi Sidoluhur yang dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Sleman Terhadap Peningkatan Pelanggan Pasar Tradisional. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2024.

<sup>54</sup> Wawancara, 28 april 2025.

<sup>55</sup> Wahab, wawancara 29 april 2025.

kepada pedagang tentang *good governance* memang sulit karna bahasa yang asing dan abstrak. Contohnya saja penerapan transparansi redistribusi, pedagang akan bingung mereka hanya tahu harus membayar sejumlah uang, mereka tidak mengerti bahwa sistem baru yang akan diterapkan bertujuan agar uang tersebut tidak dikorupsi dan bisa dibuktikan penggunaannya. Kebingungan ini bisa menjadi penyebab penolakan, pedagang menolak kebijakan baru karena mereka tidak memahami apa manfaatnya bagi mereka. Diperlukan sosialisasi menggunakan bahasa pasar yang praktis, sederhana, dan fokus pada manfaat langsung agar maksud dari kebijakan baru tersebut tersampaikan dengan baik.

Mempertahankan kualitas pasar agar tidak kalah saing. Tantangan ini berkaitan dengan standar kualitas dan pelayanan yang dituntut oleh kebanyakan konsumen saat ini, yang telah terbiasa dengan kenyamanan pasar modern. Pasar modern unggul dalam aspek kenyamanan, estetika, dan kebersihan seperti kebersihan lantai, parker yang teratur dan harga yang jelas. Banyak pasar tradisional gagal mempertahankan daya saing karena kualitas lingkungan yang tidak baik seperti kumuh, becek, sampah menumpuk dan sanitasi buruk. Kualitas layanan yang kurang seperti pedagang yang tidak ramah dan tidak ada jaminan kualitas produk. pasar mangli bila menerapkan revitalisasi fisik saja tidak cukup. Pasar perlu menerapkan revitalisasi manajemen dan perilaku seperti kewajiban menjaga kebersihan lapak, pelatihan layanan pelanggan bagi pedagang untuk menandingi kenyamanan yang ditawarkan pesaing modern. Dalam

hal ini, penerapan revitalisasi manajemen dan perilaku dipasar mangli masih kurang, sangat perlu ditingkatkan lagi serta menjadi bahan evaluasi mendalam bagi pengelola pasar.<sup>56</sup>

Menjaga fasilitas tetap terjaga dan terawat, masalah ini sering ada dan terjadi juga pada pasar mangli. Seringkali, fokus utama proyek adalah pembangunan, sementara aspek pemeliharaan jangka panjang diabaikan. Dengan hasil yang peneliti temukan bahwa revitalisasi pasar mangli ini *topdown* atau sepenuhnya dari pemerintah, sangat dimengerti bila pedagang merasa fasilitas itu adalah milik pemerintah, bukan milik bersama, sehingga mereka tidak merasa bertanggung jawab untuk menjaga kebersihannya. Anggaran untuk biaya operasional dan pemeliharaan juga seringkali minim atau tidak dialokasikan secara transparan, sehingga tidak ada dana untuk perbaikan rutin seperti mengganti lampu yang mati. Pengelola pasar juga kurang tegas dan konsisten dalam menerapkan aturan kebersihan dan ketertiban. Keberlanjutan fasilitas hanya dapat dicapai melalui keterlibatan aktif pedagang dalam proses pemeliharaan dan jaminan alokasi dana yang cukup dan transparan untuk operasional sehari-hari.

Terdapat beberapa aspek yang menjadi masalah utama dalam penerapan *good governance* di pasar mangli pasca revitalisasi yaitu sebagai berikut:

---

<sup>56</sup>Efela, Helen Ica. Strategi Pengelolaan Pasar Tradisioadil Tradisional dalam Menghadapi Pasar Modern Ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis Islam. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2023.

## 1. Aspek Partisipasi dan Komunikasi

Rendahnya Partisipasi Pedagang. Pedagang dan pemangku kepentingan pasar lainnya seringkali kurang dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan pengelolaan pasar. Kurangnya komunikasi dua arah serta minimnya dialog terbuka dan sistem informasi yang mudah diakses menyebabkan kebijakan atau program revitalisasi pasar tidak sepenuhnya dipahami atau didukung oleh pedagang. Hal ini bisa memicu konflik sosial dan penolakan.<sup>57</sup> Mengenai hal ini, ibu ida pedagang di pasar mangli berpendapat:

“untuk partisipasi masih sangat kurang, karna menurut saya pribadi dari awal berjualan jarang sekali pedagang ini dimintai pendapat. Pedagang jarang ikut serta apalagi soal perbaikan ini.”<sup>58</sup>

Sama halnya dengan ibu rasyid, saat diwawancarai beliau berkata:

“jarang sekali pedagang dilibatkan, partisipasi untuk kegiatan pasar setiap harinya mungkin iya tapi kalo sudah hal yang penting dan sifatnya besar seperti perbaikan itu semuanya urusan pengelola dan pedagang tidak ikut campur.”<sup>59</sup>

Berdasarkan pernyataan dari kedua informan tersebut, bahwa rendahnya kehadiran atau peran aktif pedagang dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi pedagang hanya terbatas pada

<sup>57</sup> SN, Elca Maghfiro, and Anwar Rosshad. Tata Kelola Pemerintahan Dalam Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Induk Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Diss. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025.

<sup>58</sup> Wawancara, 29 april 2025.

<sup>59</sup> Wawancara, 29 april 2025.

kegiatan rutin/harian pasar seperti kebersihan, jadwal buka-tutup, dsb. Terdapat gap antara keinginan pedagang untuk terlibat dengan peluang yang diberikan oleh pengelola. Komunikasi yang bersifat dua arah tidak berjalan di sini. Pedagang tidak dijadikan sumber informasi atau pertimbangan dalam perencanaan terutama pada proyek besar dan penting. Ini makin menguatkan bahwa revitalisasi di pasar mangli bersifat *top-down*. Perbaikan atau keputusan besar lainnya dianggap sebagai eksklusif milik pengelola. Tidak adanya keterlibatan pedagang ini dapat menimbulkan rasa ketidakpemilikan terhadap hasil perbaikan, yang pada akhirnya bisa menghambat keberhasilan revitalisasi pasar itu sendiri.

## 2. Aspek Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi informasi yang minim. Kurangnya penyediaan sistem informasi yang terbuka mengenai kebijakan, anggaran, alokasi lapak, hingga pengelolaan keuangan pasar membuat publik dan pedagang sulit melakukan pengawasan. Akuntabilitas pengelolaan keuangan seperti potensi praktik pungutan liar, korupsi, atau nepotisme dalam pengelolaan lapak, retribusi, dan dana pasar dapat menghambat terciptanya tata kelola yang bersih. Pada penjelasan tentang prinsip transparansi di poin satu, transparansi di pasar mangli termasuk sebagai transparansi yang parsial. Pengelola telah berhasil menerapkan keterbukaan dan kejelasan pada tingkat operasional rutin, Tetapi, pada tingkat strategis dan kebijakan publik (terkait pembangunan yang

melibatkan dana besar), prinsip Transparansi gagal diimplementasikan.

Dalam hal ini, bapak said berpendapat:

“pengelolaan dana di pasar mangli sudah cukup transparan bagi saya, iuran-iuran yang ada jelas dan tidak memberatkan pedagang. Soal perbaikan ini tidak tahu karna itu program pemerintah, pedagang tidak ikut serta.”<sup>60</sup>

Sama halnya dengan ibu Fatimah, beliau mengungkapkan mengenai hal ini bahwa:

"Kalau masalah uang iuran atau retribusi harian, saya rasa pengelolaannya sudah terbuka, kami tahu larinya ke mana dan jumlahnya pun wajar. Tapi kalau ditanya soal proyek renovasi pasar ini, kami benar-benar buta informasinya. Itu sepertinya langsung dari pemerintah, jadi kami pedagang tidak dilibatkan sama sekali." <sup>61</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, pedagang merasa bahwa sistem pengelolaan dana internal pasar seperti dana dari iuran kebersihan dan keamanan, sudah cukup baik dan terbuka. membuktikan bahwa struktur biaya operasional harian di pasar sudah disosialisasikan dengan baik, dipahami oleh pedagang, dan dianggap wajar. Pedagang merasa nyaman, percaya dan tidak curiga terhadap arus kas harian yang dikelola oleh pengelola pasar local. Revitalisasi di pasar mangli yang dianggap sepenuhnya dari pemerintah, meskipun pedagang percaya pada pengelolaan dana rutin mereka, mereka sepenuhnya dikeluarkan dari proses informasi dan pengambilan keputusan terkait proyek perbaikan besar yang didanai pemerintah. Hal ini kembali

<sup>60</sup> Wawancara, 29 april 2025.

<sup>61</sup> Wawancara, 29 april 2025.



menegaskan masalah kurangnya keterlibatan dalam proyek strategis yang sangat memengaruhi pelaku pasar.

### 3. Aspek Penegakan Hukum dan Ketertiban

Pelanggaran Ketertiban. Banyak pedagang yang melanggar aturan penataan lapak, misalnya melebihi batas area, berjualan di bahu jalan atau trotoar (Pedagang Kaki Lima/PKL), yang menyebabkan ketidaktertiban, kemacetan, dan konflik dengan pedagang resmi. Kurang Tegasnya Penertiban, sanksi yang tidak memadai atau inkonsistensi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran, terutama pedagang liar, dapat menurunkan fungsi pasar dan menimbulkan kesan ketidakadilan.

Tantangan terbesar bagi pengelola pasar adalah mengubah kebiasaan dan sikap pedagang/pengunjung yang sudah terbiasa dengan cara kerja yang lama dan tidak tertib. dalam hal ini peneliti menemukan masalah yang cukup serius yaitu masih banyak pedagang yang menggunakan lahan parkir sebagai tempat berjualan. Mengenai hal ini bapak wiyono berpendapat:

“mengenai aturan ketertiban yang diterapkan di sini sudah selalu diupayakan agar tidak ada yang melanggar. Jika terjadi pelanggaran, dari pihak pengelola selalu menganggap bahwa ada kelalaian dari pihak kami atau mungkin ada kesalahpahaman terkait peraturan yang dilanggar itu dan menjadi bahan evaluasi kami.”<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Wawancara, 29 april 2025.

Untuk ibu Fatimah, ketika diwawancarai mengenai hal ini berkata:

“aturan yang ada di pasar ini sudah bagus, enak juga berjualan kalau kondisi pasar tertib seperti ini. Tapi kalau ada pelanggaran ketertiban seperti berjualan di tempat parkir itu bukan salah pedagang, harusnya memang disediakan kios baru yang banyak, setelah perbaikan kemarin itu kios baru ada tapi tidak bisa ditempati jadinya banyak pedagang yang kembali berjualan pake alas saja seperti itu.”<sup>63</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, bahwa pengelola bertanggung jawab karena tidak serta merta menyalahkan pihak yang melanggar, melainkan melihatnya sebagai cerminan kegagalan sistem pengawasan, sosialisasi aturan, atau kejelasan aturan tersebut. Meskipun aturan yang sudah diterapkan di pasar mangli ini sudah bagus, tetapi terdapat kesenjangan antara aturan normatif dan realita lapangan. Yaitu hambatan struktural berupa tidak ketersediaan ruang berdagang yang layak, memaksa pedagang untuk melanggar dengan berjualan tidak pada tempatnya. Dari masalah ini pengelola perlu mengevaluasi, tidak hanya cara mereka mengkomunikasikan dan menegakkan aturan, tetapi juga bagaimana menyediakan dan mengelola fasilitas dagang yang dijanjikan.

#### 4. Aspek Sumber Daya dan Infrastruktur

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Kualitas dan kuantitas pengelola pasar mangli yang belum optimal dalam hal

<sup>63</sup> Wawancara 29 april 2025.

kemampuan manajerial, penegakan aturan, dan pelayanan. Keterbatasan Anggaran, dana yang terbatas menghambat investasi dalam perbaikan infrastruktur, penyediaan teknologi pendukung, atau program pelatihan. Keterbatasan anggaran inilah yang menyebabkan perbaikan infrastruktur pasar mangli sepenuhnya dari pemerintah. Masalah Kebersihan dan Sarana, pengelolaan sampah yang buruk (kurangnya armada/frekuensi pengangkutan), fasilitas yang tidak terawat (toilet, saluran air), dan penataan lapak yang tidak efisien membuat pasar menjadi tidak nyaman bagi pembeli. Masalah-masalah ini masih menjadi tantangan bagi pengelola pasar mangli walaupun sudah dilakukan revitalisasi.<sup>64</sup>

### C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan dari hasil penelitian melalui metode wawancara dan pengamatan secara langsung (observasi) yang telah dianalisis dengan menyesuaikan antara kajian teori dengan fenomena yang ada di lapangan.

Oleh karena itu, dalam masalah tersebut di fokuskan 2 hal yaitu bagaimana implementasi *good governance* di pasar mangli sebelum dan sesudah revitalisasi?, dan apa saja tantangan dalam implementasi *good governance* di pasar mangli jember?. Berikut adalah hasil pembahasan yang dikaitkan dengan teori-teori yang berkaitan dengan topic pembahasan.

---

<sup>64</sup> Observasi, 3 mei 2025.

## 1. Implementasi *Good Governance* Di Pasar Mangli Sebelum Dan Sesudah Revitalisasi

Berdasarkan hasil observasi revitalisasi di Pasar Mangli telah berhasil mengubah tampilan fisik pasar menjadi lebih modern (gedung dua lantai dan pavingisasi). Namun, terdapat keluhan mengenai fungsionalitas infrastruktur yang kurang sesuai dengan kebutuhan harian pedagang akibat minimnya pelibatan mereka dalam tahap perancangan.<sup>65</sup>

revitalisasi tidak hanya soal aspek fisik tetapi harus mampu memberikan nilai tambah ekonomi. Dalam kerangka *Good Governance*, hal ini berkaitan dengan prinsip Efektivitas dan Efisiensi. Pembangunan fisik yang tidak selaras dengan pola kerja pedagang menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya belum mencapai titik efektivitas maksimal bagi pengguna layanan publik. revitalisasi pasar tradisional sering kali menghadapi kendala dalam koordinasi antara pemerintah dan pedagang. Hal ini membuktikan bahwa tanpa sinkronisasi aspirasi, perubahan fisik bangunan belum tentu meningkatkan kualitas aktivitas ekonomi secara otomatis.<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh penulis, *good governance* sudah diterapkan dengan baik walaupun ada beberapa hal yang tidak sesuai atau bisa dikatakan

<sup>65</sup> Observasi, 4 mei 2025.

<sup>66</sup> Putu deny adistanaya, "implementasi peraturan walikota nomor 9 tahun 2009 dalam revitalisasi pasar tradisional di kota Denpasar". Fakultas hukum universitas warmadewa Denpasar bali indonesia.

gagal dalam penerapannya. Pasar mangli menerapkan 4 prinsip utama *good governance*.

Prinsip *Good governance* sudah diterapkan dipasar mangli sejak sebelum pasar mengalami revitalisasi. Dalam temuan di lapangan penulis menyimpulkan bahwa revitalisasi yang terjadi di pasar mangli merupakan revitaliasi parsial atau revitalisasi yang hanya menyentuh fisik seperti sarana dan prasarana, tetapi tidak efektif mempengaruhi atau memperbaiki aspek non fisik yaitu sistem tata kelolanya, yang seharusnya menjadi tujuan utama penerapan prinsip *good governance*.<sup>67</sup>

Dari hasil wawancara dan observasi lapangan, penerapan empat prinsip *good governance* di pasar mangli sebagai berikut:

a. Prinsip akuntabilitas.

Dalam prinsip akuntabilitas, hasil dari wawancara mengungkapkan bahwa prinsip ini diwujudkan melalui pertanggung jawaban atas kebijakan yang telah dibuat yaitu mengajukan revitalisasi. Pada revitalisasi pasar mangli pembangunan dibagi menjadi tiga tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.<sup>68</sup>

Apabila dikaitkan dengan temuan di lapangan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas sebelum revitalisasi sudah diterapkan dengan baik dan benar, tetapi setelah revitalisasi dilaksanakan terdapat kegagalan yang disebabkan oleh tidak adanya pemberitahuan yang jelas dari pihak pengelola kepada pelaku pasar terkait revitalisasi. Jika

<sup>67</sup> Observasi, 3 mei 2025.

<sup>68</sup> Wawancara 29 april 2025.

pelaku pasar merasa dilibatkan dalam proses perencanaan dan tidak merasakan perubahan yang positif setelah revitalisasi dilaksanakan, maka perlu adanya peningkatan kualitas dalam hal penerapan prinsip akuntabilitas ini.

Akuntabilitas menuntut adanya kewajiban bagi pengelola untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab pertanyaan mengenai kinerja dan tindakannya kepada publik. Di Pasar Mangli, akuntabilitas baru berjalan secara vertical ke atasan/pemerintah, namun belum optimal secara horizontal atau kepada pedagang sebagai pemangku kepentingan utama.<sup>69</sup>

#### b. Prinsip Partisipasi

Konsep partisipasi yang dilakukan pengelola adalah dengan memberikan ruang dalam hal pengambilan keputusan serta memberikan informasi seluas-luasnya bagi pedagang dan masyarakat. Akan tetapi keterlibatan atau partisipasi pedagang dalam revitalisasi Pasar Mangli belum diupayakan dengan baik oleh pengelola pasar.

Dari hasil wawancara ditemukan bahwa pelaku pasar selalu ikut berpartisipasi dalam semua kegiatan dan kebijakan yang ada di pasar. Dalam konteks revitaliasi, prinsip ini juga mengalami kegagalan dalam penerapannya karena tidak adanya ajakan untuk ikut berpartisipasi. Revitaliasi yang di anggap top-down ini berpengaruh terhadap pelaku pasar, hal ini bisa menyebabkan menurunnya

<sup>69</sup> Sjahrudin Rasul, "Penerapan *Good Governance* Di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi", komisi pemberantasan korupsi republik Indonesia

kepercayaan pelaku pasar terhadap pengelola. Keputusan strategis mengenai revitalisasi tidak dikomunikasikan secara proaktif kepada pelaku pasar. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya tempat-tempat dan kios yang tidak terpakai ataupun ditinggalkan karena tidak nyaman dan penempatannya yang kurang sesuai.<sup>70</sup>

Hal ini bertolak belakang dengan teori *Good Governance* yang menekankan pentingnya partisipasi aktif semua pemangku kepentingan /*stakeholders* dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan yang hanya ada di akhir menunjukkan pola komunikasi searah atau *top-down*. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu di mana partisipasi pedagang yang terbatas dalam relokasi menyebabkan penolakan dan ketidakoptimalan hasil. Hal ini mengonfirmasi bahwa tanpa partisipasi sejak awal, kebijakan publik cenderung tidak responsif terhadap kebutuhan riil pedagang.<sup>71</sup>

c. Tegaknya supremasi hukum

Penerapan prinsip ini di pasar mangli jember diterapkan cukup baik dalam hal oprasional pasar sehari-hari, seperti penentuan prasional, sanksi dal lain sebagainya. Akan tetapi sebelum dan sesudah revitaliasi penerapan prinsip ini juga mengalami perbedaan. prinsip ini menuntut adanya aturan yang jelas, tertulis, dan ditegakkan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di Pasar Mangli, penerapannya dapat

<sup>70</sup> Observasi, 5 mei 2025.

<sup>71</sup> Hikmatyas, mimin sundari nasution, “*good governance* dalam relokasi pasar selodang kelapa di kabupaten indragili hilir”. Universitas riau.

dilihat dari dua sisi: normatif (yang seharusnya) dan faktual (berdasarkan kesaksian pedagang).

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, Pada tingkat operasional harian, prinsip ini berjalan efektif melalui penegakan aturan jam buka dan sanksi yang jelas. Namun, dalam konteks aset (lapak), terjadi ketidakjelasan yang membuat pedagang merasa tidak memiliki kepastian hukum atas tempat usaha mereka pasca-revitalisasi.<sup>72</sup>

*Good Governance* menuntut aturan yang konsisten dan tidak pandang bulu. Meskipun secara normatif aturan harian ditegakkan, ketiadaan prosedur tertulis yang transparan dalam proyek revitalisasi mencederai hak pedagang untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Temuan ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang menyebutkan keberhasilan implementasi melalui kepastian kebijakan. Di Pasar Mangli, efektivitas hukum baru menyentuh aspek mikro (harian) dan belum mencapai aspek makro (kebijakan pembangunan).<sup>73</sup>

d. Prinsip transparansi.

Prinsip Transparansi dalam pengelolaan pasar tradisional adalah pilar penting dari *Good Governance* yang memastikan semua informasi terkait operasional pasar terbuka, mudah diakses, dan dipahami oleh para pemangku kepentingan, terutama pedagang dan

<sup>72</sup> Wawancara, 29 april 2025.

<sup>73</sup> A Teras Narang, "kajian implementasi *good and clean governance* di provinsi Kalimantan tengah". Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular.



masyarakat. Transparansi di pasar mangli termasuk sebagai transparansi yang parsial.

Dalam wawanacara dan observasi yang sudah dilakukan disimpulkan bahwa Pengelola berhasil menerapkan keterbukaan dan kejelasan pada tingkat operasional sehari-hari yang sangat diapresiasi oleh pelaku pasar dan mendukung prinsip *Rule of Law*. Tetapi, pada tingkat strategis dan kebijakan publik seperti pembangunan yang melibatkan dana besar, prinsip Transparansi gagal diimplementasikan. Singkatnya, Transparansi di Pasar Mangli bersifat parsial. Pengelola sangat terbuka pada hal operasional rutin seperti iuran harian dan sanksi, namun tertutup pada aspek strategis seperti anggaran dan desain revitalisasi<sup>74</sup>

Sesuai definisi dari *World Bank*, transparansi menuntut kemudahan akses informasi yang akurat bagi publik untuk memverifikasi keputusan pengelola. Ketertutupan informasi pada proyek besar di Pasar Mangli menghambat fungsi pengawasan sosial yang merupakan pilar *Good Governance*.<sup>75</sup> Dalam penelitian terdahulu juga dinyatakan bahwa kebocoran implementasi tata kelola di Indonesia seringkali disebabkan oleh kurangnya transparansi. Ketimpangan informasi antara pengelola dan pedagang menciptakan celah ketidakpercayaan publik.<sup>76</sup>

<sup>74</sup> Observasi, mei 2025.

<sup>75</sup> Aminuddin Ilmar, S. H. *Hukum tata pemerintahan*. Prenada Media, 2016.

<sup>76</sup> Ipan Nurhidayat, "prinsip-prinsip *good governance* di indonesia". Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Tasikmalaya, Indonesia.

## 2. Tantangan Dalam Implementasi *Good Governance* Di Pasar Tradisional Mangli Jember.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan oleh penulis, tantangan dalam penerapan *good governance* di pasar mangli disimpulkan kedalam beberapa aspek yaitu: aspek partisipasi dan komunikasi, aspek transparansi dan akuntabilitas, aspek penegakan hukum dan ketertiban, aspek sumber daya dan infrastruktur.

Dari hasil wawancara mengenai keempat aspek tersebut, didapatkan hasil seperti berikut:

### a. Aspek partisipasi dan komunikasi

Rendahnya partisipasi pedagang disebabkan oleh kurangnya pelibatan aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis. Partisipasi pedagang hanya terbatas pada kegiatan rutin harian seperti jadwal buka-tutup, namun tidak pada proyek besar seperti revitalisasi. Komunikasi yang berjalan bersifat satu arah (*top-down*). *Good Governance* menuntut partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pengambilan keputusan. Kurangnya dialog terbuka menyebabkan kebijakan tidak sepenuhnya didukung oleh pedagang dan memicu potensi konflik sosial.<sup>77</sup>

Apabila pedagang tidak dilibatkan, mereka cenderung tidak sepenuhnya memahami tujuan dan manfaat dari kebijakan atau program yang diterapkan, seperti revitalisasi pasar. Akibatnya, mereka menjadi tidak mendukung atau bahkan menolak implementasi program tersebut. Keputusan yang diambil tanpa masukan dari pedagang juga seringkali tidak sesuai dengan realitas lapangan atau kebutuhan operasional mereka, sehingga kebijakan

---

<sup>77</sup> Erfan Hidayat, "penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam mewujudkan kualitas pelayanan public pada dinas perdagangan kabupaten Kediri, Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kediri.

tersebut menjadi tidak efektif dan menimbulkan masalah baru. Kurangnya partisipasi membuat pedagang merasa pasar adalah milik pengelola, bukan milik bersama.<sup>78</sup>

b. Aspek transparansi dan akuntabilitas

Transparansi di Pasar Mangli bersifat parsial. Pengelola terbuka pada aspek operasional seperti retribusi/iuran, namun tertutup pada aspek strategis seperti anggaran pembangunan dan desain gedung. Hal ini menyulitkan pedagang melakukan pengawasan dan membuka celah praktik pungli atau korupsi dalam pengelolaan lapak.<sup>79</sup>

Prinsip transparansi mewajibkan penyediaan informasi yang akurat dan mudah diakses agar publik dapat memverifikasi keputusan pengelola. Akuntabilitas menuntut tanggung jawab atas setiap kebijakan, terutama yang melibatkan penggunaan dana besar dari pemerintah.<sup>80</sup> Keputusan dan dana proyek besar tidak transparan, menunjukkan kegagalan dalam komunikasi program pemerintah/pengelola tingkat atas. pengelola pasar Mangli berhasil dalam hal pengelolaan dana rutin, tetapi gagal dalam hal partisipasi dan transparansi proyek pembangunan.<sup>81</sup>

c. Aspek penegakan hukum dan ketertiban

Penegakan hukum di Pasar Mangli pasca revitalisasi berfokus pada kedisiplinan operasional. Hal ini mencakup ketegasan pengelola terhadap jam operasional pasar, penggunaan lapak sesuai zonasi, serta penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang meluber ke jalan. Pengelola menerapkan sanksi berupa teguran hingga penyegelan tempat usaha bagi pedagang yang melanggar aturan administrasi atau ketertiban umum. Namun,

<sup>78</sup> Observasi, 3 mei 2025.

<sup>79</sup> Wawancara, 29 april 2025.

<sup>80</sup> Sjahrudin Rasul, "Penerapan *Good Governance* Di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi", komisi pemberantasan korupsi republik Indonesia

<sup>81</sup> Observasi, 4 mei 2025.

tantangan muncul pada aspek keadilan pembagian lapak pasca revitalisasi yang sering kali dirasa kurang transparan prosedurnya oleh pedagang lama.<sup>82</sup>

Dari hasil wawancara, Pengelola menjelaskan bahwa mereka berupaya maksimal untuk menegakkan ketertiban dan mencegah pelanggaran. Ini mencerminkan komitmen untuk menjaga lingkungan pasar yang teratur. pengelola melihat pelanggaran sebagai cerminan dari kelalaian di pihak mereka (pengelola) atau sebagai masalah kesalahpahaman terkait peraturan. Dalam kerangka *Good Governance*, prinsip *Rule of Law* (Supremasi Hukum) menuntut agar kerangka hukum ditegakkan secara adil dan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum bukan hanya soal pemberian sanksi, tetapi juga perlindungan hak-hak dasar para pemangku kepentingan (pedagang). Di Pasar Mangli, penegakan aturan harian sudah berjalan baik, namun aspek kepastian hukum atas hak penempatan lapak memerlukan standarisasi prosedur yang lebih kuat agar tercipta keadilan bagi seluruh pedagang.<sup>83</sup>

#### d. Aspek sumber daya dan infrastruktur

Terdapat kendala signifikan pada kapasitas SDM, baik dari sisi pengelola maupun pedagang. Pengelola kesulitan memberikan pemahaman mengenai konsep *Good Governance* karena istilahnya dianggap asing dan abstrak oleh pedagang. Selain itu, perilaku pedagang dalam menjaga kebersihan dan memberikan layanan pelanggan belum mengalami kemajuan yang sebanding dengan perubahan fisik bangunan.<sup>84</sup>

Dalam *Good Governance*, sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kapasitas manajerial yang baik adalah

<sup>82</sup> Observasi, 3 mei 2025.

<sup>83</sup> Refrenri D.Sumilat, Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Pasar Tradisional, Universitas Sam Ratulangi, 2021.

<sup>84</sup> Observasi, 4 mei 2025.

kunci penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid. Revitalisasi manajemen seharusnya berjalan beriringan dengan revitalisasi fisik untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional terhadap pasar modern. Pengelola pasar adalah representasi layanan publik bagi pedagang. Jika layanan, misalnya dalam merespons keluhan, memberikan informasi, atau memproses perizinan tidak optimal, hal ini merusak kepercayaan pedagang dan memperburuk hubungan kerja sama.<sup>85</sup>




---

<sup>85</sup>Erfan Hidayat, "penerapan prinsip-prinsip good governance dalam mewujudkan kualitas pelayanan public pada dinas perdagangan kabupaten Kediri, Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kediri.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Proyek revitalisasi dipasar mangli dianggap sebagai program *top-down* atau sepenuhnya dari pemerintah, yang berarti mengabaikan prinsip partisipasi dalam pengambilan keputusan kritis. Hal ini berpotensi menyebabkan hasil revitalisasi tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan atau aspirasi nyata pedagang. Oleh karena itu, revitalisasi yang dilaksanakan di pasar mangli tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap sistem tata kelola pasar yang sudah ada sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa revitalisasi dipasar mangli hanya dilihat sebagai proyek infrastruktur saja, gagal mengintegrasikan aspek good governance. Tidak sesuai dengan tujuan revitalisasi yang ideal yaitu memperbaiki fisik dan menata ulang manajemen.

Revitalisasi Pasar Mangli telah memenuhi kriteria Multidimensi karena tidak hanya menyentuh aspek estetika bangunan (fisik), tetapi juga berupaya memperbaiki sistem perdagangan (ekonomi) dan kepastian aturan (manajemen), meskipun pada aspek partisipasi pedagang masih bersifat parsial. Revitalisasi Fisik Berhasil, tetapi Implementasi Good Governance Parsial. Revitalisasi ini berhasil memberikan pondasi fisik, sarana, dan prasarana yang jauh lebih baik dan nyaman.

## 2. Masalah Utama dan Tantangan

Masalah ketertiban dan pelanggaran pasca-revitalisasi terungkap sebagai masalah struktural, bukan hanya disiplin. Kesenjangan Infrastruktur: Pelanggaran ketertiban (seperti berjualan di tempat parkir) disebabkan oleh kurangnya ketersediaan atau akses ke kios baru yang dijanjikan dan layak. Revitalisasi fisik Pasar Mangli sudah terwujud, tetapi revitalisasi tata kelola (penerapan *Good Governance*) masih belum optimal dan bersifat top-down, yang menjadi hambatan utama bagi keberlanjutan dan efektivitas pasar pasca-proyek.

## B. Saran

### 1. Bagi pengelola pasar

- a. Tingkatkan transparansi operasional melalui pelaporan berkala mengenai penggunaan anggaran, biaya operasional, serta investasi perbaikan fasilitas kepada pedagang dan pengunjung.
- b. Perkuat kapasitas manajerial melalui pelatihan reguler mengenai manajemen pasar, tata kelola keuangan, dan layanan publik.
- c. Kembangkan mekanisme partisipasi yang lebih terstruktur, misalnya forum pedagang–pengelola untuk menyalurkan masukan terkait regulasi, jam operasional, dan fasilitas.

## **2. Bagi pembuat kebijakan**

- a. Rumuskan kerangka regulasi yang jelas dan konsisten untuk pasar tradisional pasca-revitalisasi, dengan landasan hukum yang mudah dipahami oleh semua pihak.
- b. Implementasikan sistem pembayaran digital secara bertahap untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan pasar.
- c. Sediakan indikator kinerja (KPI) yang terukur terkait layanan, kenyamanan, dan kepuasan pelanggan untuk evaluasi berkala.

## **3. Bagi peneliti lanjutan**

- a. Lakukan studi komparatif antar pasar tradisional di berbagai daerah untuk mengidentifikasi variasi implementasi good governance serta faktor pendukung atau penghambatnya.
- b. Terapkan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak revitalisasi terhadap kesejahteraan pedagang, volume transaksi, dan kepuasan pengguna pasar.
- c. Investigasi peran teknologi informasi (misalnya platform digital untuk transaksi dan transparansi anggaran) dalam memperkuat akuntabilitas dan partisipasi.

## **4. Bagi stakeholder komunitas pasar**

- a. Tingkatkan literasi keuangan dan hukum bagi pedagang serta pengunjung agar regulasi dan prosedur pasar dipahami secara luas.





## DAFTAR PUSTAKA

- A Teras Narang, “kajian implementasi good and clean governance di provinsi Kalimantan tengah”. Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular.
- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 215.
- Abd. Rahman, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”. Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi.
- Abd. Rohman, “revitalisasi pasar rakyat sebagai upaya menjaga eksistensi pasar tradisional”. Program studi administrasi publik universitas tribhuwana tungadewi Indonesia.
- Alfianita, Ella. *Revitalisasi pasar tradisional dalam perspektif good governance (studi Di pasar tumpang kabupaten malang)*. Diss. Brawijaya University, 2015.
- Alfianita, Ella. *Revitalisasi pasar tradisional dalam perspektif good governance (studi Di pasar tumpang kabupaten malang)*. Diss. Brawijaya University, 2015.
- Aminuddin Ilmar, S. H. *Hukum tata pemerintahan*. Prenada Media, 2016.
- Arbainah, “Good Governance dalam pembangunan pasar agrobisnis tradisional modern barabai di kabupaten hulu sungai tengah”. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik<sup>12</sup> Universitas Lambung Mangkurat.
- Aryani, Maura Dyan Septa. *Partisipasi Masyarakat, Kompetensi, Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul*. Diss. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021.
- Ava Ayun Avinas dan Ria Angin M. si, Implementasi Program Pengembangan Pasar Tradisional Menjadi Lebih Baik Di Kabupaten Jember, fakultas ilmu social dan ilmu politik, Universitas Negeri Muhammadiyah Jember.
- Ava Ayun Avinas dan Ria Angin M. si, Implementasi Program Pengembangan Pasar Tradisional Menjadi Lebih Baik Di Kabupaten Jember, fakultas ilmu social dan ilmu politik, Universitas Negeri Muhammadiyah Jember.
- bu Fatimah, wawancara, 29 April 2025.

- Diah Woro Ayuningtiyas, Penerapan *Good Governance* Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Keimigrasian, *journal of administration and international*, vol 2 no 1, 2020.
- Ela Alfianita, *Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Perspektif Good Governance*, jurnal administrasi publik, vol 3 no 05, fakultas ilmu administrasi Universitas Brawijaya Malang.
- Ela Alfianita, *Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Perspektif Good Governance*, jurnal administrasi publik, vol 3 no 05, fakultas ilmu administrasi Universitas Brawijaya Malang.
- Ela Alfianita, *Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Perspektif Good Governance*, jurnal administrasi publik, vol 3 no 05, fakultas ilmu administrasi Universitas Brawijaya Malang.
- Ella alfianita, revitalisasi pasar tradisional dalam perspektif good governance, jurnal administrasi publik, vol 03, No 05.
- Elvira Zeyn, pengaruh penerapan good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan, fakultas ekonomi universitas pasundan bandung, vol 10 No 1, 2011.
- Erfan Hidayat, Teguh Pramono, Imam Fachruddin, Fendy Artha Prissando, “penerapan prinsip-prinsip good governance dalam mewujudkan kualitas pelayanan public pada dinas perdagangan kabupaten Kediri, Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kediri.
- Fitria, Devi Rahmatul. *Revitalisasi Tari Topeng Kaliwungu Lumajang*. Diss. Stkw Surabaya, 2023.
- Hikmatyas, mimin sundari nasution, “good governance dalam relokasi pasar selodang kelapa di kabupaten indragili hilir”. Universitas riau.
- Ibu Agus, wawancara, 29 April 2025.
- imin Sundari Nasution, Good Governance Dalam Relokasi Pasar Selodang Kelapa Di Kabupaten Indragiri Hilir, *Public Service And Governance Journal*, vol 4 No 02, juli 2023.
- Ipan Nurhidayat, “prinsip-prinsip good governance di indonesia”. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Tasikmalaya, Indonesia.
- Lestari, E. (2024). *Persepsi Konsumen Mengenai Harga, Lokasi dan Kualitas Pasar Terhadap Minat beli Konsumen di Pasar Klandasan*. Jurnal Minfo Polgan, 13(1), 133-138.

Putu deny adistanaya, “implementasi peraturan walikota nomor 9 tahun 2009 dalam revitalisasi pasar tradisional di kota Denpasar”. Fakultas hukum universitas warmadewa Denpasar bali indoesia.

Refrenri D.Sumilat, Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Pasar Tradisional, Universitas Sam Ratulangi, 2021.

Rifa’I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 67-114.

Siskaperbapo. jatimprov.go.id.

Sjahruddin Rasul, “Penerapan Good Governance Di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”, komisi pemberantasan korupsi republic Indonesia,

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), 309.

Suprihatin Lestari, *Mengenal Dan Membaca Pasar*,jurnal ekonomi syariah, vol 5 edisi II, 2022.

Wahab, Said, *wawancara*, 29 April 2025.

Wiyono, *wawancara*, 29 April 2025

Wiyono, *wawancara*, 29 April 2025.

Wiyono, *wawancara*, 29 April 2025.

Yuni Syafa’atul Barokah, Dampak Revitalisasi pasar tradisional dalam meningkatkan pendapatan pedagang pasar tanjung kabupaten jemmer, fakultas ekonomi dan bisnis islam, Mei 2020.

Zurich Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (GV Syakir Media Press,2021), 159-172.



## PSURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FAJRIYAH RAMADHANI

Nim : 212105020068

Prodi/Jurusan : Ekonomi Syariah/ Fakultas Ekonomi dan Bianis Islam

Alamat : Krang Mluwo Mangli Kec. Kaliwates Jember Jawa Timur

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "ANALISIS IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* DI PASAR TRADISIONAL MANGLI JEMBER PASCA REVITALISASI". Benar-benar hasil karya tulis saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebut sumbernya. Apabila ada kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya akan jadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 27 November 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SYARIF  
JEMBER

1000  
METERAI  
TEMPEL  
45705411X162132697  
FAJRIYAH RAMADHANI  
212105020068

### 1. Matriks Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Analisis Implementasi <i>good governance</i> di pasar tradisional mangli jember pasca revitalisasi	1. <i>Good Governance</i> 2. Revitalisasi	1. <i>Good Governance</i> 2. Revitalisasi	A. Transparansi B. Akuntabilitas C. Partisipasi Masyarakat D. Supremasi Hukum	Informan: A. Pengelola Pasar B. Pedagang C. Pengunjung/Masyarakat	A. Pendekatan Penelitian: Kualitatif B. Jenis Penelitian: <i>Field Research</i> C. Subyek Penelitian: Teknik <i>Purposive</i> D. Lokasi Penelitian: Pasar Mangli Jember E. Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, Dokumentasi F. Teknik Analisis Data: Deskriptif G. Teknik Keabsahan Data: Triangulasi sumber	1. Bagaimana Implementasi <i>Good Governance</i> Di Pasar Tradisional mangli jember? 2. Apa saja tantangan dalam implementasi <i>good governance</i> di pasar tradisional mangli jember?



## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Pertanyaan

#### 1. Fokus: Bagaimana implementasi *good governance* di pasar tradisional mangli jember?

- a. Apakah *good governance* sudah diterapkan pada pengelolaan pasar tradisional mangli jember?
- b. Bagaimana penerapan *good governance* pada pasar mangli sebelum dan sesudah revitalisasi?
- c. Bagaimana bentuk akuntabilitas pasar mangli?
- d. Bagaimana konsep partisipasi yang diterapkan di pasar mangli?
- e. Apakah ketika revitalisasi dilaksanakan melibatkan pihak lain?
- f. Bagaimana prinsip *predictability* diterapkan? (pembagian kios dan toko)
- g. Apakah pedagang dilibatkan saat musyawarah terkait pembagian kios?
- h. Bagaimana transparansi diterapkan di pasar mangli?
- i. Apakah ada cara khusus dalam penarikan distribusi ,dll?

#### 2. Fokus: Apa saja tantangan dalam implementasi *good governance* di pasar tradisional mangli jember?

- a. Apakah ada tantangan dalam merepakan *good governance* di pasar mangli?
- b. Apa saja masalah yang ada di pasar?
- c. apa saja kesulitan yang dialami pasca revitalisasi?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kalwates, Jember, Jawa Timur Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B- /Un.22/7.a/PP.00.9/ /2025  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Maret 2025

Kepada Yth.

Kepala Pasar Mangli Jember

Jl. Hayam Wuruk No 221, Karang Miuwo, Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Dsampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Fajriyah Ramadhani  
N M : 212105020068  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Analisis Implementasi Good Governance Di Pasar Tradisional Pasca Revitalisasi di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



### JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	tanggal	Kegiatan penelitian	Paraf
1	25 april 2025	Menyerahkan surat izi penelitian dan mini proposal	<i>Pri</i>
2	27 april 2025	Diterimanya surat izin penelitian di pasar mangli	<i>Pri</i>
3	28 april 2025	Melakukan wawancara menanyakan profil pasar mangli	<i>Pri</i>
4	29 april 2025	Wawancara dengan pedagang dan pengunjung di pasar mangli	<i>Pri</i>
5	3 mei 2025	Observasi lingkungan pasar	<i>Pri</i>
6	5 mei 2025	Observasi bangunan terbengkalai	<i>Pri</i>
7	9 juni 2025	Penelitian selesai dan meminta surat keterangan selesai penelitian	<i>Pri</i>

Jember, 12 juni 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Kepala bendahara pembantu

*Pri*  
WITONO

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Fajriyah Ramadhani

NIM : 212105020068

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Implementasi Good Governance di Pasar Tradisional Mangli Jember Pasca Revitalisasi

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan Aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada Aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 28 November 2025

Operator Aplikasi Turnitin  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Luluk Mustiroh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## Dokumentasi penelitian



Wawancara dengan bapak wiyono selaku  
pembantu bendahara pasar (tanggal 29 april 2025)



Wawancara dengan bapak said salah satu pedagang di pasar mangli (tanggal 29  
april 2025)





Wawancara bersama bapak wahab salah satu pedagang di pasar mangli ( tanggal 29 april 2025)



Wawancara dengan ibu Fatimah salah satu pedagang  
Di pasar mangli (tanggal 29 april 2025)



Wawancara dengan ibu agus pedagang di pasar mangli (29 april 2025)



Wawancara dengan ibu siti salah satu pelanggan di pasar mangli (tanggal 29 april 2025)

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	tanggal	Kegiatan penelitian	Paraf
1	25 april 2025	Menyerahkan surat izi penelitian dan mini proposal	
2	27 april 2025	Diterimanya surat izin penelitian di pasar mangli	
3	28 april 2025	Melakukan wawancara menanyakan profil pasar mangli	
4	29 april 2025	Wawancara dengan pedagang dan pengunjung di pasar mangli	
5	3 mei 2025	Observasi lingkungan pasar	
6	5 mei 2025	Observasi bangunan terbengkalai	
7	9 juni 2025	Penelitian selesai dan meminta surat keterangan selesai penelitian	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 12 juni 2025.

Kepala bendahara pembantu

.....

## BIODATA PENULIS



Nama : Fajriyah Ramadhani  
Tempat tanggal lahir : Jember, 07 November 2002  
Jenis kelamin : Perempuan  
Alamat : Mangli Kaliwates Jember  
Agama : Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan/prodi : Ekonomi Syariah  
Nomor Telepon/ HP : 0895349556777  
E-mail : [riaramadhani655@gmail.com](mailto:riaramadhani655@gmail.com)

## RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Mangli 01 Jember (2015)
2. MTS Annuriyyah (2018)
3. MA Ibrahimy (2021)
4. UIN Khas jember (2025)